

PROFIL TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA 2016



PROFIL TENAGA KERJA PROVINSI PAPUA 2016



PROFIL KETENAGAKERJAAN PROVINSI PAPUA 2016

ISBN : -
No Publikasi : 94530.1601
Katalog BPS : 2303003.94
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : *x + 63 halaman*

Naskah :
Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :
Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh :
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

KATA PENGANTAR

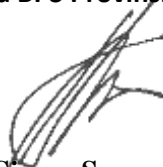
Badan Pusat Statistik Provinsi Papua setiap tahun menerbitkan Profil Ketenagakerjaan Provinsi Papua. Profil Ketenagakerjaan ini disusun berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2016. Profil Ketenagakerjaan berisi informasi seputar keadaan tenaga kerja di Provinsi Papua.

Publikasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran fenomena sosial terutama di bidang tenaga kerja dan gambaran tentang capaian pembangunan di bidang ketenagakerjaan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, dan memberi perhatian sehingga publikasi ini bisa terwujud dengan segala keterbatasan dan kekurangannya.

Saran dan masukan sangat diharapkan guna menyempurnakan penerbitan publikasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Besar harapan kami semoga buku ini bermanfaat untuk semua, terimakasih.

Jayapura, Mei 2017
Kepala BPS Provinsi Papua



Drs. Simon Sapary, M.sc
NIP. 19660607 199302 1 001

ORGANISASI PENULISAN

Penanggung Jawab

Drs. Simon Sapary, M.Sc

Editor

Fadjri Amora, SE

Paul Santoso, S.ST

Penulis dan Pengolah Data

Paul Santoso, S.ST

Rut M. Nirmala Nadapdap, SST

Layout

Rut M. Nirmala Nadapdap, SST

Diah Wahyuni

Desain Cover

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Organisasi Penulisan	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	5
Bab II Konsep dan Definisi	6
Bab III Penduduk Usia Kerja.....	17
3.1 Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	17
3.2 Penduduk Usia Kerja menurut Kota/Desa	19
3.3 Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Utama.....	20
Bab IV Penduduk Angkatan Kerja.....	23
4.1 Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	23
4.2 Angkatan Kerja menurut Kota/Desa	24
4.3 Angkatan Kerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan	25
Bab V Penduduk Bekerja.....	29
5.1 Penduduk Bekerja menurut Kelompok Umur.....	29
5.2 Penduduk Bekerja menurut Kabupaten/Kota.....	31
5.3 Penduduk Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan	32
5.4 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha	34
5.5 Penduduk Bekerja menurut Jam Kerja	39

5.6	Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan	41
5.7	Penduduk Bekerja menurut Sektor Formal Informal.....	44
Bab VI Pengangguran		47
6.1	Pengangguran menurut Kelompok Umur	47
6.2	Pengangguran menurut Kabupaten/Kota	48
6.3	Pengangguran menurut Keegiatannya	49
6.4	Pengangguran menurut Tingkat Pendidikan	51
6.5	Setengah Pengangguran	52
Bab VII Indikator Ketenagakerjaan.....		55
7.1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	55
7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	56
7.3	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK).....	57
7.4	Perkembangan Indikator Tenaga Kerja	59
7.5	Penduduk Bukan Angkatan Kerja.....	60
Bab VIII Kesimpulan		62

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Penduduk Usia Kerja menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	18
Tabel 3.2	Penduduk Usia Kerja menurut Kota/Desa dan Jenis Kelamin.....	19
Tabel 3.3	Penduduk Usia Kerja menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	22
Tabel 4.1	Penduduk Angkatan Kerja menurut Kota/Desa dan Jenis Kelamin.....	25
Tabel 4.2	Persentase Angkatan Kerja menurut Kota/Desa dan Pendidikan yang Ditamatkan	26
Tabel 5.1	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kota/Desa dan Jenis Kelamin	32
Tabel 5.2	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kota/Desa dan Pendidikan yang Ditamatkan	33
Tabel 5.3	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kota/Desa dan Lapangan Pekerjaan Utama.....	34
Tabel 5.4	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kota/Desa dan Lapangan Pekerjaan Utama	35
Tabel 5.5	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan.....	37
Tabel 5.6	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan	38
Tabel 5.7	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jumlah Jam Kerja.....	40
Tabel 6.1	Pengangguran menurut Kota/Desa dan Jenis Kelamin....	49
Tabel 6.2	Pengangguran menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin.....	49
Tabel 7.1	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tahun 2011-2016	59

Tabel 7.2 Penduduk Bukan Angkatan Kerja menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan	60
--	----

<http://papua.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Ketenagakerjaan Sakernas.....	6
Gambar 3.1	Persentase Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Utama	21
Gambar 4.1	Penduduk Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur.....	24
Gambar 4.2	Penduduk Angkatan Kerja menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin	25
Gambar 5.1	Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	30
Gambar 5.2	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur	31
Gambar 5.3	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan	33
Gambar 5.4	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kota/Desa dan Lapangan Usaha ...	36
Gambar 5.5	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jam Kerja	39
Gambar 5.6	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin	42
Gambar 5.7	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kota/Desa dan Status Pekerjaan ...	43
Gambar 5.8	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Lapangan Usaha.....	44
Gambar 5.9	Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status dan Jenis Kelamin	45
Gambar 6.1	Pengangguran menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	48

Gambar 6.2	Pengangguran menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan.....	52
Gambar 6.3	Setengah Penganggur Terpaksa menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin.....	53
Gambar 6.4	Setengah Penganggur Terpaksa menurut Pendidikan yang Ditamatkan	54
Gambar 7.1	TPAK menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	56
Gambar 7.2	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kelompok Umur	57
Gambar 7.3	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menurut Kelompok Umur	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perekonomian suatu wilayah, penduduk dan Ketenagakerjaan merupakan komponen penting. Jumlah angkatan kerja, penduduk yang bekerja, angka pengangguran merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Secara sederhana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketenagakerjaan adalah bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan, dan sebaliknya semakin banyak tenaga kerja yang terserap maka akan meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, strategi/perencanaan di bidang ketenagakerjaan mutlak diperlukan. Oleh karena itu, data yang terkait dengan ketenagakerjaan perlu disediakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi.

Badan Pusat Statistik sebagai instansi penyedia data berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Data ketenagakerjaan diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS). Pelaksanaan Sakernas tahun 2016 dilakukan secara semesteran, yakni pada bulan Februari dan Agustus. Secara umum SAKERNAS yang dilaksanakan pada semester 1 dapat digunakan untuk mengestimasi keadaan tenaga kerja sampai level provinsi. Sementara itu, khusus untuk semester 2 (Agustus) dapat menyajikan data sampai level kabupaten/kota, namun khusus untuk tahun 2016 data yang disajikan hanya sampai level provinsi. Dari sisi penimbang (*weight*), indikator ketenagakerjaan dalam publikasi ini telah menggunakan jumlah penduduk hasil proyeksi.

Melalui survei ini dapat diperoleh gambaran umum ketenagakerjaan seperti jumlah tenaga kerja yang tersedia, jumlah pengangguran, tingkat

penyerapan tenaga kerja menurut lapangan usaha, dan status pekerjaan dari penduduk yang bekerja. Selain itu, indikator-indikator penting ketenagakerjaan seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga dapat diketahui.

Provinsi Papua yang terdiri dari 29 kabupaten/kota mempunyai permasalahan ketenagakerjaan yang terbilang kompleks. Jika dilihat dari segi kuantitas, jumlah angkatan kerja maupun penduduk yang bekerja mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2014 jumlah angkatan kerja sebanyak 1.675.113 meningkat menjadi 1.741.945 pada tahun 2015. Sedangkan pada tahun 2016 menjadi 1.722.162. Angka pengangguran menurun dari 3,99 persen pada tahun 2015 menjadi 3,35 persen pada tahun 2016. Secara umum, tingkat pengangguran di Papua masih tergolong rendah dan bahkan lebih rendah dibanding angka nasional (6,18 persen). Kondisi ini semestinya menjadi kondisi ideal untuk dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka akan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, yang selanjutnya dapat menurunkan angka kemiskinan. Namun, kenyataan yang terjadi bukanlah demikian. Walaupun angka pengangguran terbilang rendah dan angkatan kerja yang tersedia dalam jumlah yang banyak, tidak serta merta berdampak pada penurunan angka kemiskinan. Di tingkat nasional, Papua merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin terbanyak, yaitu sebesar 28,55 persen (kondisi September 2016).

Tingkat Pengangguran di Provinsi Papua tergolong rendah, bahkan lebih rendah dibanding angka nasional.

Permasalahan mendasar ketenagakerjaan di Papua adalah rendahnya kualitas tenaga kerja.

Permasalahan mendasar yang dihadapi Papua di bidang ketenagakerjaan adalah rendahnya kualitas tenaga kerja. Pendidikan dan

keahlian rendah, jenis pekerjaan yang dilakukan pun adalah yang tidak membutuhkan *skill* tinggi, seperti bertani. Dampaknya pendapatan yang diterima juga relatif kecil. Hal inilah yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di Papua.

Publikasi ini rutin disusun setiap tahun untuk memberikan Gambaran mengenai kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Papua. Selain itu, dalam publikasi ini juga memuat penjelasan, konsep dan definisi juga istilah-istilah (terminologi) ketenagakerjaan, sehingga pembaca dapat lebih memahami data dan informasi yang disajikan.

1.2 Ruang Lingkup

Publikasi Profil Ketenagakerjaan di Provinsi Papua 2016 disusun dari data SAKERNAS bulan Agustus 2016. Pembahasan dibatasi hanya sampai tingkat provinsi, mengingat kecukupan jumlah sampel hanya untuk estimasi sampai level provinsi.

*Pembahasan
dibatasi sampai
tingkat Provinsi
Papua*

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum publikasi ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- Mengetahui komposisi penduduk usia kerja dirinci menurut jenis kelamin, jenis kegiatan, dan kelompok umur;
- Mengetahui karakteristik angkatan kerja menurut jenis kelamin, pendidikan, kelompok umur;
- Mengetahui karakteristik penduduk yang bekerja menurut jenis kelamin, pendidikan, kelompok umur, lapangan usaha, status pekerjaan, jam kerja, dan sektor formal/informal;

-
- Mengetahui karakteristik pengangguran menurut jenis kelamin, kelompok umur, pendidikan, dan jenis kegiatan;
 - Mengetahui indikator ketenagakerjaan di Provinsi Papua.

<http://papua.bps.go.id>

1.4 Sistematika Penulisan

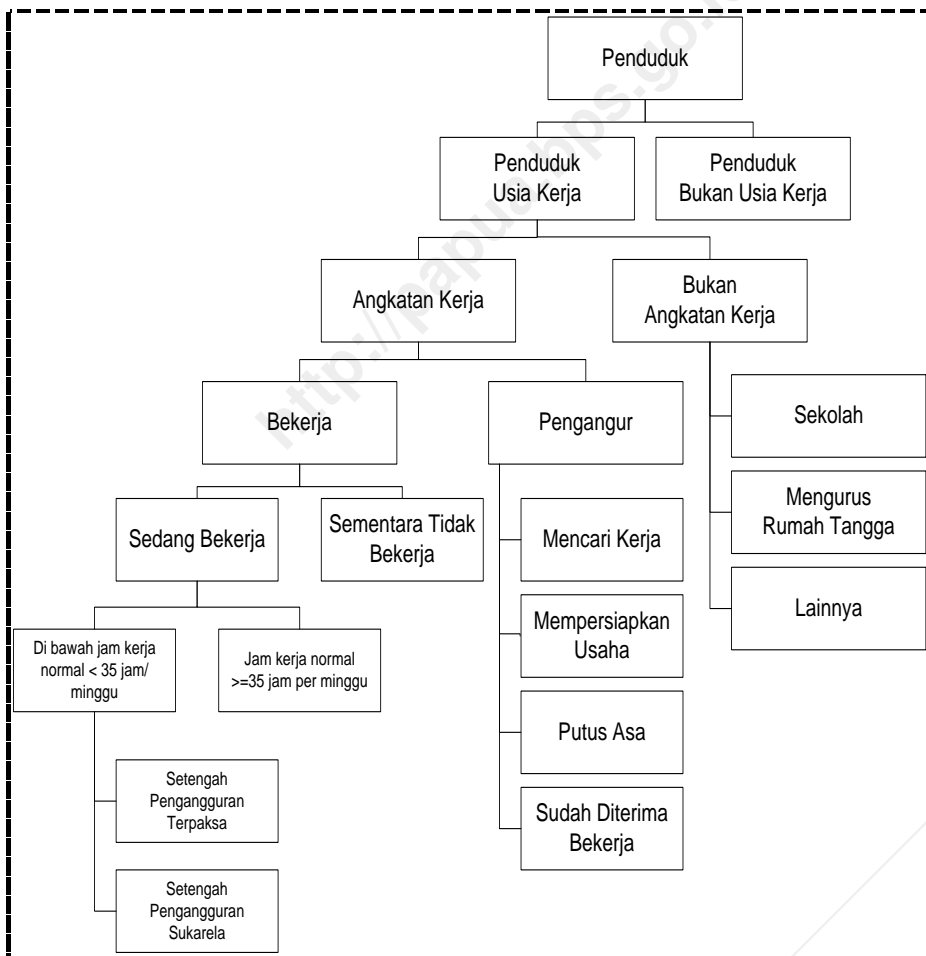
Publikasi ini terdiri dari delapan bab, dijabarkan sebagai berikut:

- Bab I. Berisi tentang latar belakang, ruang lingkup, tujuan, dan sistematika penulisan.
- Bab II. Berisi konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan.
- Bab III. Membahas tentang karakteristik penduduk usia kerja yang dirinci menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan kegiatan terbanyak selama seminggu yang lalu.
- Bab IV. Berisi tentang karakteristik angkatan kerja, termasuk didalamnya bukan angkatan kerja yang dirinci menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan pendidikan.
- Bab V. Menjelaskan tentang kondisi penduduk yang bekerja yang dirinci menurut jenis kelamin, pendidikan, kelompok umur, lapangan usaha, status pekerjaan, jumlah jam kerja.
- Bab VI. Berisi karakteristik pengangguran menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan pendidikan.
- Bab VII. Membahas tentang perkembangan dari beberapa indikator ketenagakerjaan, meliputi: TPAK, TPT, dan TKK.
- Bab VIII. Kesimpulan

BAB II KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh Badan Pusat Statistik mengacu *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh *International Labor Organization (ILO)*. Konsep ini membagi penduduk menjadi dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Konsep tersebut dapat digambarkan dalam diagram ketenagakerjaan berikut:

Gambar 2.1. Diagram Ketenagakerjaan Sakernas



Definisi yang berkaitan dengan penerapan konsep tersebut di Indonesia dijelaskan dalam uraian berikut:

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih.

Penduduk Angkatan Kerja

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya.

Penduduk Bekerja

Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Sementara tidak bekerja adalah keadaan dari seseorang yang mempunyai pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena berbagai sebab, seperti: sakit, cuti, menunggu panen, mogok, dan sebagainya, termasuk mereka yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja. Mulai tahun 2011, mereka yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja dikategorikan sebagai pengangguran (sesuai konsep ILO, hal. 97 "*An ILO Manual on Concepts and Methods*").

Contoh:

- a. Pegawai pemerintah/swasta yang sedang tidak masuk bekerja karena cuti, sakit, mogok, mangkir, mesin/peralatan perusahaan mengalami kerusakan, dan sebagainya.
- b. Petani yang mengusahakan tanah pertanian dan sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya (menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah).
- c. Orang-orang yang bekerja atas tanggungan/resikonya sendiri dalam suatu bidang keahlian, yang sedang tidak bekerja karena sakit, menunggu pesanan dan sebagainya. **Misalnya:** dalang, tukang cukur, tukang pijat, dan sebagainya.

Klasifikasi Formal–Informal,

Beberapa pihak, mendefinisikan kegiatan informal hanya berdasarkan status pekerjaan, namun dalam publikasi ini, pendekatan batasan kegiatan informal diambil dari kombinasi antara jenis pekerjaan utama dan status pekerjaan. Batas kegiatan informal dapat dilihat seperti pada bagan berikut :

Batasan Kegiatan Informal

Status Pekerjaan	Jenis Pekerjaan Utama									
	Tenaga Profesional	Tenaga Kepemimpinan	Pejabat Pelaksana dan Tata Usaha	Tenaga Penjualan	Tenaga Usaha Jasa	Tenaga Usaha Pertanian	Tenaga Produksi	Tenaga Operasional	Pekerja Kasar	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Berusaha Sendiri	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Buruh Tak Dibayar	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>INF</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>INF</i>
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Buruh Dibayar	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>
Buruh/Karyawan/Pegawai	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>
Pekerja Bebas di Pertanian	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>
Pekerja Bebas di Non Pertanian	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>F</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>
Pekerja Tak Dibayar	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>	<i>INF</i>

Note : F = Formal

INF=Informal

Penduduk Pengangguran

Penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. Mereka yang mencari pekerjaan.
- b. Mereka yang mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

(lihat pada “*An ILO Manual on Concepts and Methods*”)

Mencari pekerjaan adalah kegiatan seseorang yang tidak bekerja dan pada saat survei orang tersebut sedang mencari pekerjaan, seperti mereka :

- a. Yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan.
- b. Yang sudah pernah bekerja, karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Usaha mencari pekerjaan ini tidak terbatas pada seminggu sebelum pencacahan, jadi mereka yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan dan yang permohonannya telah dikirim lebih dari satu minggu yang lalu tetap dianggap sebagai mencari pekerjaan. Mereka yang sedang bekerja atau yang sedang dibebaskan tugas, baik akan dipanggil kembali ataupun tidak, dan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, tidak dapat disebut sebagai penganggur terbuka.

Mempersiapkan suatu usaha adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan yang “baru”, yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/pekerja

dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan yang dimaksud adalah apabila **“tindakannya nyata”**, seperti : mengumpulkan modal atau perlengkapan/alat, mencari lokasi/ tempat, mengurus surat ijin usaha, dan sebagainya, telah/sedang dilakukan.

Mempersiapkan usaha tidak termasuk yang baru merencanakan, berniat, dan baru mengikuti kursus/pelatihan dalam rangka membuka usaha.

Mempersiapkan suatu usaha yang nantinya cenderung pada pekerjaan sebagai berusaha sendiri (*own account worker*) atau sebagai berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar atau sebagai berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar.

Penjelasan :

Kegiatan mempersiapkan suatu usaha/pekerjaan tidak terbatas dalam jangka waktu seminggu yang lalu saja, tetapi bisa dilakukan beberapa waktu yang lalu asalkan seminggu yang lalu masih berusaha untuk mempersiapkan suatu kegiatan usaha.

Setengah Penganggur adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Setengah Penganggur terdiri dari:

- a. **Setengah Penganggur Terpaksa** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- b. **Setengah Penganggur Sukarela** adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu), tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain (sebagian pihak menyebutkan sebagai pekerja paruh waktu/*part time worker*).

Penduduk Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia 15 tahun atau lebih yang tidak termasuk Angkatan Kerja yang dibedakan menurut jenis kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak antara lain sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya.

- a. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan.
- b. **Mengurus rumah tangga** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya: ibu-ibu rumah tangga dan anaknya yang membantu mengurus rumah tangga. Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapatkan upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja.
- c. **Kegiatan lainnya** adalah kegiatan seseorang selain disebut di atas, yakni mereka yang sudah pensiun, orang-orang yang cacat jasmani (buta, bisu dan sebagainya) yang tidak melakukan sesuatu pekerjaan seminggu yang lalu.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah tingkat pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah).

Jumlah jam kerja seluruh pekerjaan adalah jumlah jam kerja yang dilakukan oleh seseorang (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan) selama seminggu yang lalu.

Bagi pedagang keliling, jumlah jam kerja dihitung mulai berangkat dari rumah sampai tiba kembali di rumah dikurangi waktu yang tidak merupakan jam kerja, seperti mampir ke rumah famili/kawan, dan sebagainya.

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja.

Jenis pekerjaan/jabatan adalah macam pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau ditugaskan kepada seseorang yang sedang bekerja atau yang sementara tidak bekerja. Jenis pekerjaan ini mengikuti KBJI (Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia) 2002 yang mengacu pada ISCO 88.

Upah/gaji bersih adalah penerimaan buruh/karyawan berupa uang atau barang yang dibayarkan perusahaan/kantor/majikan tersebut. Penerimaan dalam bentuk barang dinilai dengan harga setempat. Penerimaan bersih yang dimaksud tersebut adalah setelah dikurangi dengan potongan-potongan iuran wajib, pajak penghasilan, dan sebagainya oleh perusahaan/kantor/majikan.

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Status pekerjaan dibedakan menjadi 7 kategori yaitu :

- a. **Berusaha sendiri**, adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, yaitu dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak

dibayar, termasuk yang sifat pekerjaannya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

- b. **Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar**, adalah bekerja atau berusaha atas resiko sendiri, dan menggunakan buruh/pekerja tak dibayar dan atau buruh/pekerja tidak tetap.
- c. **Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar**, adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/pekerja tetap yang dibayar.
- d. **Buruh/Karyawan/Pegawai**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Buruh yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan, tetapi sebagai pekerja bebas. Seseorang dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki 1 (satu) majikan (orang/rumah tangga) yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pada sektor bangunan batasannya tiga bulan. Apabila majikannya instansi/lembaga, boleh lebih dari satu.
- e. **Pekerja bebas di pertanian**, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi : pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan perburuan, termasuk juga jasa pertanian. **Majikan** adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati.

-
- f. **Pekerja bebas di non pertanian** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap (lebih dari 1 majikan dalam sebulan terakhir), di usaha non pertanian dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.

Usaha non pertanian meliputi : usaha di sektor pertambangan, industri, listrik, gas dan air, sektor konstruksi/ bangunan, perdagangan, angkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan, sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan. Huruf e dan f yang dikembangkan mulai pada publikasi 2001, pada tahun 2000 dan sebelumnya dikategorikan pada huruf d dan a (huruf e termasuk dalam d dan huruf f termasuk dalam a).

- g. **Pekerja tak dibayar** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari :

- Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri/anak yang membantu suaminya/ayahnya bekerja di sawah.
- Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti famili yang membantu melayani penjualan di warung.

Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya.



Halaman ini sengaja dikosongkan

<http://papua.bp>

BAB III

PENDUDUK USIA KERJA

3.1 Penduduk Usia Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Dalam istilah ketenagakerjaan, penduduk usia kerja biasa disebut sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja adalah bagian dari penduduk yang dari sisi usia dipandang telah mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Banyaknya tenaga kerja menyimpan potensi ekonomi yang dimiliki suatu wilayah. Mereka yang berpartisipasi aktif dalam pasar kerja biasa disebut dengan angkatan

Jumlah penduduk usia kerja di Papua tahun 2016 sebesar 2.245.462 orang

kerja. Sementara itu mereka yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lain tergolong sebagai bukan angkatan kerja. Batasan umur yang digunakan Indonesia dalam mengelompokkan penduduk usia kerja mengacu pada konsep *International Labour Organization (ILO)*, yaitu 15 tahun

ke atas. Sedangkan penduduk yang berusia di bawah 15 tahun digolongkan sebagai penduduk bukan usia kerja.

Pada tahun 2016, jumlah penduduk usia kerja di Provinsi Papua mencapai 2.245.462 orang. Sekitar 77,56 persennya didominasi oleh penduduk

Penduduk usia kerja laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

usia muda (15 sampai 44 tahun). Sementara itu sekitar 23,44 persen merupakan penduduk berumur 45 tahun ke atas. *Supply* tenaga muda yang besar ini menjadi potensi yang luar biasa jika diiringi dengan peningkatan kualitas berupa keahlian dan keterampilan.

Secara umum persentase penduduk usia kerja laki-laki (53,29 persen) lebih banyak dibanding perempuan (46,71 persen). Hal ini sejalan dengan rasio jenis kelamin di Papua di atas 100, yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih

banyak dibanding perempuan. Jika dilihat menurut kelompok umur, persentase terbesar penduduk usia kerja adalah kelompok umur 15-19 tahun yang mencapai 13,95 persen.

Tabel 3.1 Penduduk Usia Kerja menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Usia Kerja		Jumlah	Persentase Penduduk Usia Kerja		Persentase Kelompok Umur
	L	P		L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
15-19	167 352	145 997	313 349	53.41	46.59	13.95
20-24	163 758	146 351	310 109	52.81	47.19	13.81
25-29	153 852	143 789	297 641	51.69	48.31	13.26
30-34	143 650	135 420	279 070	51.47	48.53	12.43
35-39	138 268	130 523	268 791	51.44	48.56	11.97
40-44	130 868	119 364	250 232	52.30	47.70	11.14
45-49	110 035	90 108	200 143	54.98	45.02	8.91
50-54	81 548	60 020	141 568	57.60	42.40	6.30
55-59	50 946	36 045	86 991	58.56	41.44	3.87
60-64	27 993	19 571	47 564	58.85	41.15	2.12
65+	28 384	21 620	50 004	56.76	43.24	2.23
Jumlah	1 196 654	1 048 808	2 245 462	53.29	46.71	100.00

Sumber: Sakernas, Agustus 2016

Dominasi peran penduduk usia muda merupakan sebuah keuntungan sekaligus menjadi *big opportunity* bagi pembangunan ekonomi suatu wilayah. Oleh karena itu perlu diperhatikan mengenai pendidikan dan keterampilannya, sehingga bukan hanya dominan dalam hal jumlah namun juga dalam kualitas. Kualitas tenaga kerja inilah yang menjadi *point* penting dalam meningkatkan produktivitas kerja yang akan berdampak pada kemajuan ekonomi. Usaha ini dapat dilakukan antara lain dengan membekali mereka dengan pendidikan dan

ketrampilan yang memadai, dan sesuai dengan dunia usaha yang membutuhkan.

3.2 Penduduk Usia Kerja menurut Kota/Desa

Jumlah penduduk usia kerja umumnya sebanding dengan jumlah penduduknya. Sebaran jumlah penduduk usia kerja menurut daerah tempat tinggal tahun 2016 tersaji pada Tabel 3.2 berikut.

Jumlah penduduk usia kerja paling tinggi berada di daerah Perdesaan yaitu sebanyak 1.606.778 orang atau sekitar 71,6 persen penduduk usia kerja di Papua.

Sedangkan daerah Perkotaan memiliki penduduk usia kerja senilai 638.684 atau sekitar 27,29 persen dari seluruh jumlah penduduk usia kerja di Papua.

Selanjutnya jika ditinjau menurut jenis kelamin, penduduk usia kerja laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Hal ini sama terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan.

Penduduk usia kerja paling banyak terdapat di daerah Perdesaan dibandingkan daerah Perkotaan

Tabel 3.2 Penduduk Usia Kerja menurut Kota/Desa dan Jenis Kelamin

Kota/Desa	Jenis Kelamin				Total	
	Laki-Laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan	352 398	55.17	286 286	44.82	638 684	100
Perdesaan	844 256	52.54	844 256	47.45	1 606 778	100
Total	1 196 654	53.29	1 048 808	46.7	2 245 462	100

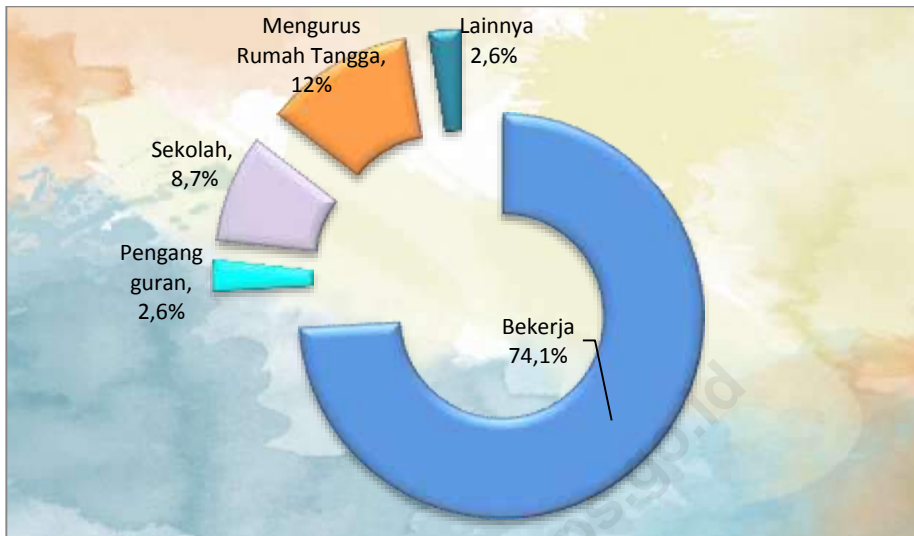
Sumber: Sakernas, Agustus 2016

3.3 Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Utama

Berdasarkan kegiatan utama yang dilakukan, penduduk usia kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah mereka yang aktif secara ekonomi dalam pasar kerja. Sementara bukan angkatan kerja adalah mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lainnya.

Konsep ini mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, kondisi secara umum yang terjadi di Indonesia termasuk Papua adalah banyak ditemukan adanya pekerja anak (15 tahun ke bawah). Meskipun mereka aktif secara ekonomi, namun mereka tidak digolongkan sebagai angkatan kerja karena tidak memenuhi konsep batasan umur penduduk usia kerja. Kedua, masih menganut asas eksklusivitas di mana seorang penduduk hanya dapat digolongkan dalam satu kategori. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang kuliah sambil bekerja. Mereka hanya dapat dimasukkan dalam salah satu kategori, bekerja atau sekolah. Meskipun pada kenyataannya mereka melakukan kedua kegiatan tersebut.

Gambar 3.1 Persentase Penduduk Usia Kerja menurut Kegiatan Utama



Sumber: Sakernas, Agustus 2016

Berdasarkan Gambar 3.1 di atas, diketahui bahwa kegiatan utama sebagian besar penduduk Papua yang berusia 15 tahun ke atas adalah bekerja (74,1 persen). Sementara itu, persentase penduduk yang menganggur sebanyak 2,6 persen. Selanjutnya sebanyak 23,3 persen penduduk usia kerja tidak terlibat secara aktif dalam perekonomian, yaitu mereka yang mengurus rumah tangga, sekolah, dan melakukan kegiatan lainnya masing-masing sebesar 12 persen, 8,7 persen, dan 2,6 persen.

- *Sebagian besar penduduk usia kerja berpendidikan kurang dari SD*
- *Tingkat pendidikan perempuan relatif lebih rendah dibanding laki-laki*

Salah satu ukuran kualitas penduduk usia kerja dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Lebih dari setengah penduduk usia kerja masih berpendidikan rendah. Ada sebanyak 33,62 persen penduduk usia kerja adalah mereka yang belum tamat SD atau bahkan belum pernah bersekolah, selanjutnya sebanyak 18,30 persen berpendidikan SD. Sementara itu,

penduduk usia kerja yang berpendidikan tinggi (Diploma/Sarjana) hanya 7,69 persen.

Sejalan dengan hal itu, jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase perempuan usia kerja yang berpendidikan di bawah SD (56,4 persen) lebih tinggi dibanding laki-laki. Namun sebaliknya untuk pendidikan SD ke atas secara persentase perempuan kalah dibanding laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa di Papua secara umum laki-laki mempunyai pendidikan yang lebih tinggi dibanding perempuan.

Tabel 3.3 Penduduk Usia Kerja menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
di bawah SD	329 312	425 820	755 132
<i>(persentase)</i>	43.6	56.4	100.00
SD	215 147	195 709	410 856
<i>(persentase)</i>	52.4	47.6	100.00
SLTP	209 219	169 186	378 405
<i>(persentase)</i>	55.3	44.7	100.00
SLTA	340 051	188 285	528 336
<i>(persentase)</i>	64.4	35.6	100.00
PT	102 925	69 808	172 733
<i>(persentase)</i>	59.6	40.4	100.00
Total	1 196 654	1 048 808	2 245 462
<i>(persentase)</i>	53.3	46.7	100.00

Sumber: Sakernas, Agustus 2016

BAB IV

PENDUDUK ANGKATAN KERJA

4.1 Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

Jumlah penduduk angkatan kerja menggambarkan jumlah penduduk usia kerja yang aktif dalam perekonomian. Aktif di sini berarti bahwa mereka berusaha untuk menghasilkan/memproduksi barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari penduduk bekerja dan pengangguran. Pengangguran tetap digolongkan ke dalam angkatan kerja karena meskipun mereka belum menghasilkan pendapatan, namun mereka berusaha mendapatkan pekerjaan.

Pada tahun 2016, jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua mencapai 1.722.162 orang. Hampir 59,65 persen dari jumlah tersebut berjenis kelamin laki-laki, sementara sisanya 40,35 persen adalah perempuan. Tidak dapat dipungkiri walaupun jumlah penduduk usia kerja antara laki-laki dan perempuan secara jumlah tidak terpaut jauh, namun kenyataannya laki-laki lebih banyak terlibat secara aktif dalam

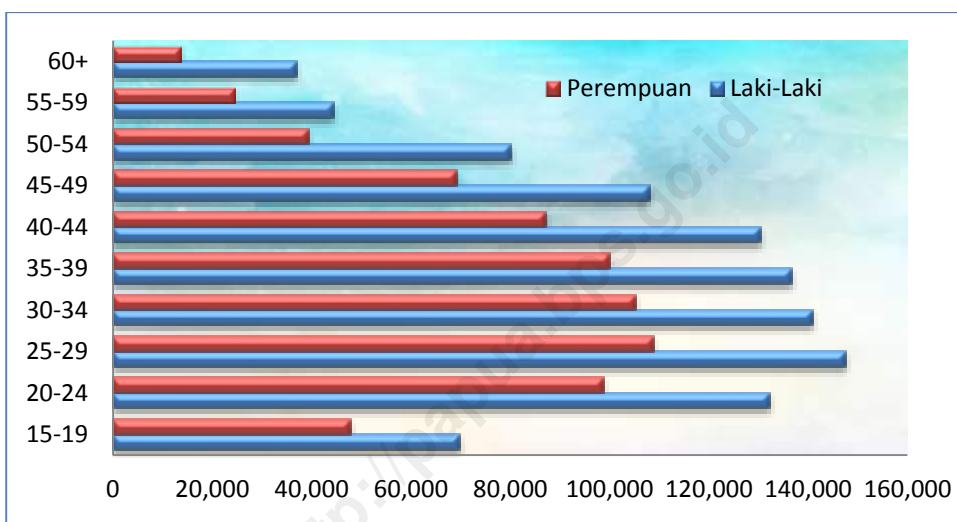
ekonomi dibanding perempuan. Sekitar 23,48 persen perempuan yang termasuk usia kerja lebih memilih mengurus rumah tangga daripada terlibat secara aktif dalam perekonomian.

Umur akan sangat mempengaruhi penduduk apakah mereka akan masuk ke dalam pasar kerja atau tidak. Pada kelompok usia muda (15-19 tahun), sebagian besar penduduk cenderung memilih bekerja daripada sekolah. Dengan semakin meningkatnya umur, maka makin banyak penduduk yang aktif dalam perekonomian, sampai mencapai puncaknya pada usia 25-29

- *Jumlah angkatan kerja di Papua tahun 2016 sebesar 1.722.162 orang.*
- *Angkatan kerja paling banyak terdapat pada kelompok umur 25-29 tahun.*

tahun. Dan selanjutnya jumlah angkatan kerja akan kembali menurun seiring dengan banyaknya penduduk yang meninggalkan pasar kerja karena telah memasuki masa pensiun atau telah berhenti bekerja. Gambaran mengenai jumlah penduduk angkatan kerja yang dirinci berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur tersaji pada Gambar 4.1 berikut.

Gambar 4.1 Penduduk Angkatan Kerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur



Sumber: Sakernas, Agustus 2016

4.2 Angkatan Kerja menurut Kota/Desa

Sebaran angkatan kerja menurut kabupaten/kota di Papua tidak tergantung pada jumlah penduduk usia kerjanya, meskipun secara umum berlaku demikian. Jumlah penduduk usia kerja yang unggul secara kuantitas, seperti di daerah perkotaan tidak serta merta memiliki jumlah angkatan kerja yang besar pula. Tabel 4.1 di bawah menyajikan jumlah angkatan kerja di perdesaan dan perkotaan Provinsi Papua pada tahun 2016.

Angkatan kerja paling tinggi terdapat di daerah perdesaan yaitu sebanyak 1.313.695 orang. Sedangkan daerah perkotaan menyumbangkan angkatan kerja hanya sebanyak 408.467 orang. Pada daerah perkotaan jumlah

penduduk angkatan kerja dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Hal yang sama juga terjadi pada daerah pedesaan.

Tabel 4.1 Penduduk Angkatan Kerja menurut Kota/Desa dan Jenis Kelamin

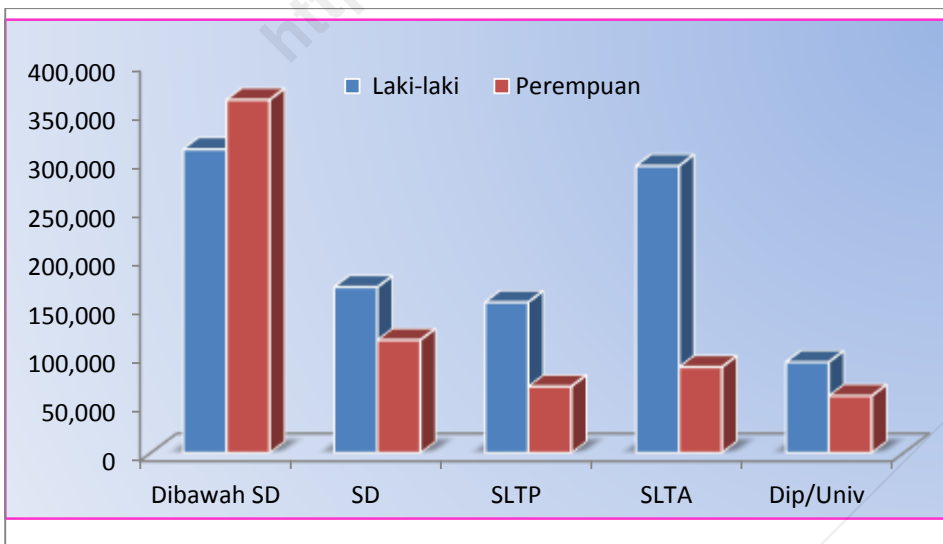
Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	280 254	128 213	408 467
Perdesaan	747 091	566 604	1 313 695
Jumlah (Papua)	1 027 345	694 817	1 722 162

Sumber: Sakernas, Agustus 2016

4.3 Angkatan Kerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Kualitas tenaga kerja suatu daerah dapat diukur salah satunya dengan melihat tingkat pendidikannya. Gambaran mengenai tingkat pendidikan angkatan kerja di Papua terdapat pada Gambar 4.3 berikut.

Gambar 4.2 Penduduk Angkatan Kerja menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin



Sumber: Sakernas, Agustus 2016

Secara umum kualitas angkatan kerja di Papua masih rendah. Hal ini terlihat dari sebagian besar angkatan kerja di Ppua masih memiliki pendidikan lebih rendah dari SD. Penduduk angkatan kerja yang tidak tamat SD atau bahkan yang belum pernah sekolah pada tahun 2015 ada sebanyak 675.083 orang (45,20 persen) sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 675 083 (55,88 persen). Di sisi lain mereka yang berpendidikan tinggi (Diploma/Univ) juga meningkat dari (6,58 persen) menjadi 152.320 (8,84 persen).

Selain itu, ketimpangan gender dalam hal pendidikan juga masih terlihat. Dari Gambar di atas kita dapat melihat bahwa tingkat pendidikan angkatan kerja perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Pada level pendidikan di bawah SD terlihat bahwa dari sisi jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Namun, semakin tinggi level pendidikan, ternyata laki-laki lebih beruntung dalam mengenyam pendidikan dibanding perempuan. Sebagai contoh pada level pendidikan SLTA, persentase laki-laki adalah sebanyak 76,93 persen, sedangkan perempuan hanya 23,07 persen begitu pula pada level pendidikan berikutnya. Potret keadaan pendidikan angkatan kerja ini hendaknya dapat menjadi acuan dalam penentuan kebijakan dalam bidang pendidikan terutama bagi perempuan.

Tabel 4.2 Persentase Angkatan Kerja menurut Kota/Desa dan Pendidikan yang Ditamatkan

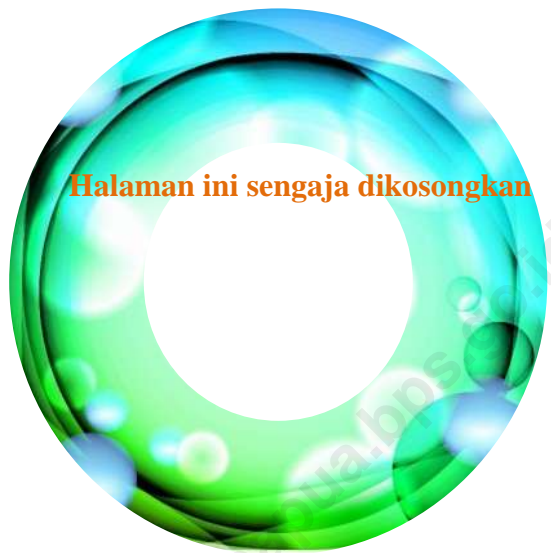
Kota/Desa	Pendidikan yang Ditamatkan				Jumlah
	< SD	SD	SLTP	SLTA+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	4.8	16.2	14.2	64.9	100.0
Perdesaan	49.9	16.8	12.6	20.6	100.0
Jumlah (Papua)	39.2	16.7	13.0	31.1	100.0

Sumber: Sakernas, Agustus 2016

Persentase penduduk angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SLTA ke atas pada umumnya mendominasi di daerah perkotaan. Sedangkan pada daerah perdesaan, lebih banyak penduduk angkatan kerja dengan pendidikan kurang dari SD. Hal ini disebabkan banyaknya pekerjaan di daerah perkotaan yang membutuhkan kemampuan khusus (*skill*) melalui tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan pekerjaan di daerah perdesaan.

Persentase angkatan kerja berpendidikan SLTA ke atas lebih tinggi di daerah perkotaan dibandingkan perdesaan

Selain itu, bila dilihat dari tingkat pendidikan penduduk angkatan kerja secara umum di Provinsi Papua masih banyak didominasi oleh kelompok kurang dari SD. Kualitas pendidikan merupakan sebuah modal dasar penggerak laju pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, tentunya akan menjadi catatan sendiri bagi Pemerintah dalam membangun dan mendorong pendidikan terutama di daerah perdesaan agar kualitas tenaga kerjanya dapat lebih baik.



BAB V PENDUDUK BEKERJA

5.1 Penduduk Bekerja menurut Kelompok Umur

Dalam menganalisis ketenagakerjaan, penduduk yang bekerja dapat dibedakan menurut kelompok umur. Tujuannya adalah untuk melihat kontribusi pekerja berdasarkan kelompok umur dalam dunia pasar kerja. Idealnya, mayoritas penduduk yang bekerja dalam pasar kerja adalah mereka yang berusia prima. Namun tidak menutup kemungkinan penduduk usia muda dan tua dapat ikut andil dalam pasar tenaga kerja tersebut. Hal ini antara lain disebabkan adanya rasa tanggung jawab untuk mencari nafkah dan membantu ekonomi rumah tangga dan keluarga.

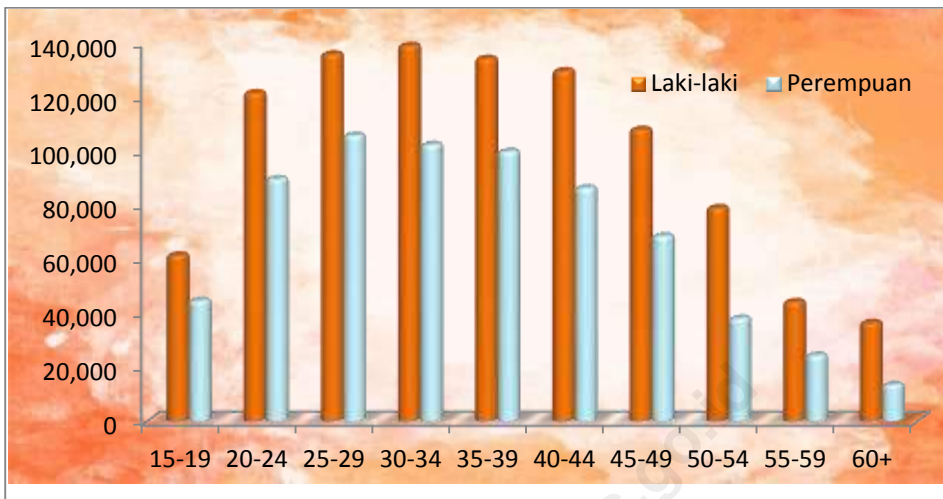
Pada tahun 2016 jumlah penduduk bekerja di Provinsi Papua sebanyak 1.664.485 orang atau setara 96,65 persen dari seluruh angkatan kerja yang ada. Dari jumlah penduduk yang bekerja sekitar 60 persen adalah laki-laki, sementara sisanya 40 persen adalah perempuan. Sementara itu, distribusi penduduk yang bekerja menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat dari Gambar 5.1 berikut.

Secara umum penduduk yang bekerja pada setiap kelompok umur memiliki pola yang sama antara laki-laki dan perempuan. Pada kelompok umur muda belum banyak penduduk yang terjun ke pasar kerja. Hal ini disebabkan karena mereka lebih cenderung memilih untuk bersekolah dibanding bekerja.

Penduduk bekerja di Papua didominasi oleh penduduk pada segmen usia 25 – 29 tahun

Penduduk bekerja dengan jumlah terbanyak berada di rentang usia 25-29 tahun, yaitu 241.683 orang atau sekitar 14,52 persen. Sedangkan pekerja usia tua (55 tahun ke atas) yang masih aktif bekerja ada sebanyak 7,2 persen.

Gambar 5.1 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur

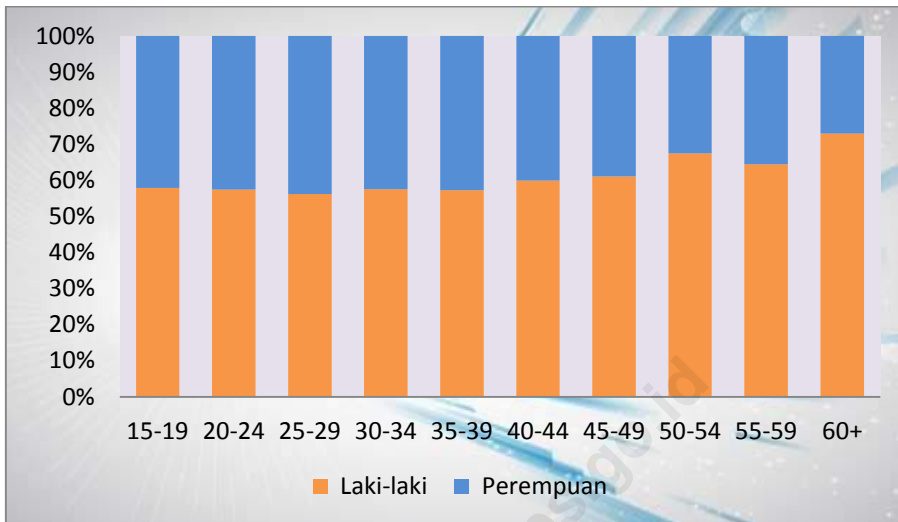


Sumber: Sakernas, Agustus 2016

Selain itu, dari Gambar di atas juga menunjukkan bahwa penduduk usia kerja dengan jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Hal ini berlaku pada setiap kelompok umur, jumlah dan persentase pekerja perempuan berada di bawah laki-laki.

Sejalan dengan kondisi tersebut, persentase perempuan yang terlibat dalam dunia kerja juga mengalami penurunan seiring dengan peningkatan umurnya. Sebaliknya, persentase laki-laki yang bekerja pada setiap kelompok umur justru mengalami peningkatan. Sebagai ilustrasi tampak pada kelompok usia 45-49 tahun, persentase laki-laki dan perempuan yang bekerja berturut-turut adalah 61 persen dan 39 persen. Kemudian pada kelompok usia 60 tahun ke atas persentasenya menjadi 70 persen dan 30 persen. Persentase penduduk bekerja menurut jenis kelamin pada setiap kelompok umur dapat dilihat pada Gambar 5.2 di bawah ini.

Gambar 5.2 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur



Sumber: Sakernas, Agustus 2016

5.2 Penduduk Bekerja menurut Kota/Desa

Pola sebaran penduduk bekerja di Provinsi Papua menurut kota/desa sama dengan pola sebaran angkatan kerja yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Daerah dengan jumlah penduduk bekerja paling tinggi terdapat pada perdesaan.

Bila dilihat dari tabel 5.1 maka pada daerah perkotaan, penduduk bekerja dengan jenis kelamin laki-laki 261.986 (69,04 persen) lebih banyak dibandingkan perempuan 117.482 (30,96 persen). Begitupun di daerah perdesaan penduduk bekerja dengan jenis kelamin laki-laki 727.946 (59,47 persen) lebih banyak daripada perempuan 674.553 (40,53 persen).

Tabel 5.1 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kota/Desa dan Jenis Kelamin

Kota/Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	261 986	727 946	989 932
Perdesaan	117 482	557 071	674 553
Jumlah (Papua)	379 468	1 285 017	1 664 485

Sumber: Sakernas, Agustus 2016

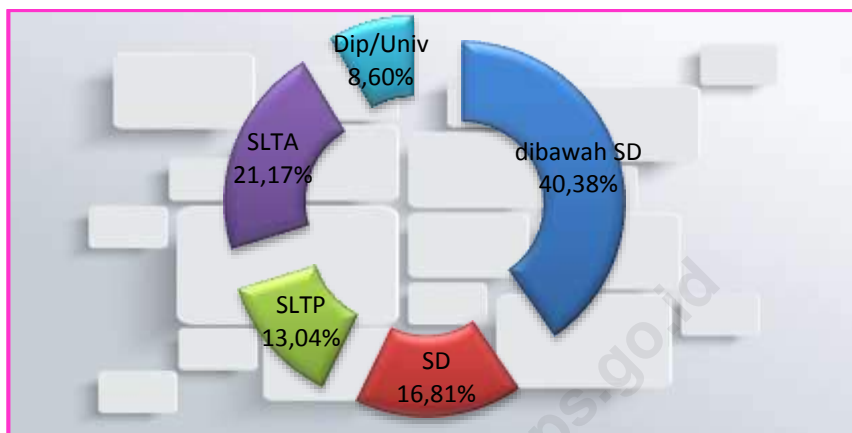
5.3 Penduduk Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Selain dapat dibedakan menurut kelompok umur, dalam ketenagakerjaan penduduk yang bekerja juga dapat dibedakan menurut tingkat pendidikan. Salah satu tujuannya adalah untuk melihat seberapa besar pasar tenaga kerja dapat menyerap tenaga kerja dengan tingkat keahlian atau keterampilan tertentu sesuai dengan tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang tidak menjamin semakin mudah baginya untuk memperoleh pekerjaan apalagi yang sesuai dengan pendidikannya. Adanya tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup menyebabkan pasar tenaga kerja yang dimasuki seseorang yang berpendidikan tinggi tak jarang menjadi tidak tepat.

Pada tahun 2016, lebih dari separuh penduduk yang bekerja adalah berpendidikan SD ke bawah, bahkan 40 persen lebih dari total penduduk yang bekerja merupakan penduduk yang tidak tamat SD atau belum pernah sekolah. Persentase Penduduk bekerja yang berpendidikan SD sebanyak 16,81 persen. Sedangkan tingkat pendidikan SLTP dan SLTA berturut-turut

mempunyai persentase 13,04 persen dan 21,17 persen. Sementara penduduk dengan tingkat pendidikan Diploma ke atas hanya 8,60 persen.

Gambar 5.3 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Pendidikan yang Ditamatkan



Sumber: Sakernas, Agustus 2016

Tabel 5.2 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kota/Desa dan Pendidikan yang Ditamatkan

Kota/Desa	Pendidikan yang Ditamatkan				Jumlah
	< SD	SD	SLTP	SLTA+	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan	19 004	64 546	53 528	242 390	379 468
Perdesaan	653 066	215 331	163 498	253 122	1 285 017
Jumlah	672 070	279 877	217 026	495 512	1 664 485

Sumber: Sakernas, Agustus 2016

Begitu juga jika melihat tingkat pendidikan pekerja menurut kota/desa yang disajikan pada tabel 5.2 di atas. Pekerja berpendidikan kurang dari SD dan tamat SD memiliki jumlah terbesar dari jumlah pekerja di daerah perdesaan.

Kualitas pendidikan pekerja yang ada di daerah perdesaan ini masih rendah salah satunya diakibatkan oleh minimnya fasilitas pendidikan. Hal ini menjadi tugas berat bagi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan pekerjanya.

Pada daerah perkotaan, pekerja dengan pendidikan SLTA ke atas mendominasi di daerah ini dengan persentasenya sebesar 63,87 persen.

5.4 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan tempat bekerja di mana seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha yang digunakan BPS mengikuti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha akan menunjukkan sektor ekonomi apa yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Untuk memudahkan dalam analisis, publikasi ini menggunakan pengelompokan lapangan usaha dalam tiga kelompok, yaitu pertanian, industri, dan Jasa. Tabel 5.3 dan Tabel 5.4 di bawah menggambarkan distribusi penduduk yang bekerja menurut kota/desa dan lapangan pekerjaan utama.

Tabel 5.3 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kota/Desa dan Lapangan Pekerjaan Utama

Kota/Desa	Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah
	Pertanian	Industri	Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	60 716	51 281	267 471	379 468
Perdesaan	1 034 953	41 174	208 890	1 285 017
Jumlah (Papua)	1 095 669	92 455	476 361	1 664 485

Sumber: Sakernas, Agustus 2016

Tabel 5.4 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kota/Desa dan Lapangan Pekerjaan Utama

Kota/Desa	Lapangan Pekerjaan Utama			Jumlah
	Pertanian	Industri	Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan	16.00	13.51	70.49	100
Perdesaan	80.54	3.20	16.26	100
Jumlah (Papua)	65.83	5.55	28.62	100

Sumber: Sakernas, Agustus 2016

Kedua tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Papua bertumpu pada sektor pertanian. Pada tahun 2016, persentase penduduk yang bekerja pada sektor pertanian mencapai 1.095.669 orang atau sekitar 65,83

- Sektor Pertanian masih menjadi sektor utama yang menyerap tenaga kerja di Papua
- Struktur perekonomian di daerah perkotaan telah mengalami pergeseran dari sektor pertanian ke industri dan jasa

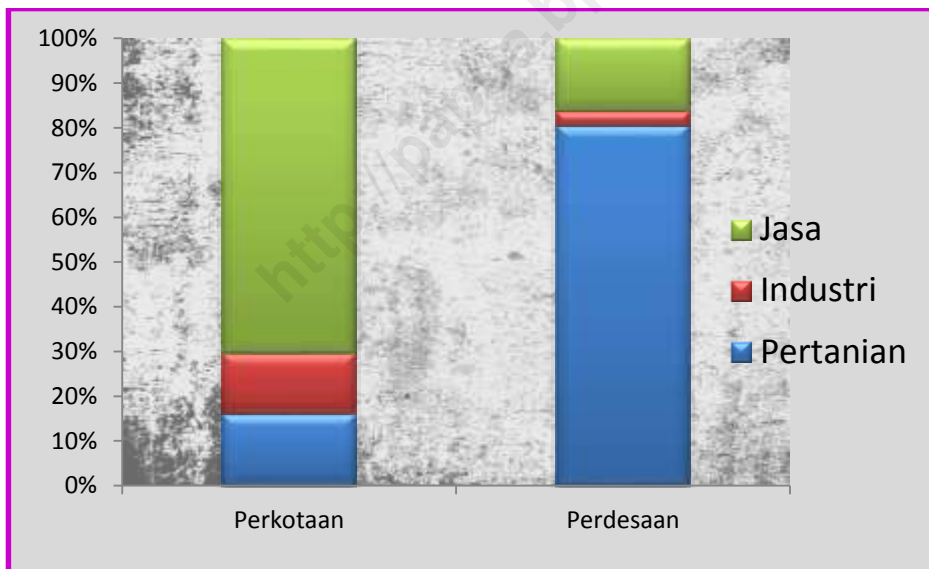
persen dari total seluruh pekerja. Sementara itu, sektor berikutnya yang menjadi tulang punggung perekonomian Papua adalah sektor jasa dengan jumlah pekerja sebanyak 476.361 orang atau sekitar 28,62 persen. Kemudian pekerja yang bekerja pada sektor industri hanya sekitar 5,55 persen. Meskipun pada dasarnya kontribusi terbesar perekonomian Papua berasal dari sektor manufaktur berupa pertambangan, namun kenyataannya tenaga kerja yang terserap di sektor ini hanya sedikit.

Jika dibandingkan secara umum dalam struktur perekonomian Papua, pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan. Namun jika ditinjau menurut kota/desa, sektor pertanian pada daerah perkotaan telah mengalami

pergeseran ke sektor sekunder. Gambaran mengenai persentase pekerja menurut lapangan usaha dan topografi wilayah tersaji pada Gambar 5.5.

Pergeseran struktur perekonomian dari pertanian ke sektor industri dan jasa umumnya terjadi di daerah perkotaan. sebagian besar pekerja berada pada sektor jasa (70,49 persen), sedangkan sektor pertanian hanya sekitar 16 persen. Di sisi lain, sektor pertanian masih menjadi mata pencaharian utama bagi penduduk di daerah perdesaan. Persentase pekerja pertanian di daerah perdesaan mencapai lebih dari 85 persen. Untuk jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 5.4 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kota/Desa dan Lapangan usaha



Sumber: Sakernas, Agustus 2016

Selanjutnya jika ditinjau berdasarkan pendidikannya, pekerja dengan pendidikan SD ke bawah mengelompok di sektor pertanian. Walaupun ada juga pekerja dengan pendidikan lulusan perguruan tinggi yang termasuk ke dalam sektor ini, yaitu sebanyak 9.536 orang atau sekitar 0,9 persen. Ada dua

kemungkinan yang terjadi, yang pertama adalah karena terbatasnya lapangan usaha lain, sehingga mereka terpaksa bekerja di sektor pertanian. Kedua, bisa jadi mereka berperan sebagai pengusaha di bidang pertanian (bukan sebagai buruh tani).

Tabel 5.5 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan

Lapangan Usaha	Pendidikan yang Ditamatkan					Jumlah
	< SD	SD	SLTP	SLTA	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian	649 921	206 256	131 786	98 170	9 536	1 095 669
Pertambangan	932	3 249	2 028	6 050	1 275	13 534
Industri	1 332	4 408	9 396	16 038	1 384	32 558
LGA	0	0	542	2 168	1 117	3 827
Konstruksi	2 577	5 615	10 394	20 906	3 044	42 536
Perdagangan	12509	35 912	35 424	64 076	12 231	160 152
Transportasi	1 756	14 532	13 765	42 761	2 999	75 813
Lembaga Keuangan	420	358	738	9 696	6 154	17 366
Jasa	2 623	9 547	12 953	92 456	105 451	223 030
Jumlah	672 070	279 877	217 026	352 321	143 191	1 664 485

Sumber: Sakernas, Agustus 2016

Jika lapangan usaha kita rinci lagi menjadi 9 sektor, secara umum tampak bahwa sektor-sektor selain sektor pertanian, lebih membutuhkan spesifikasi pendidikan dengan level lebih tinggi dari SD. Misalnya pada sektor pertambangan, mayoritas pekerja yang terserap sekitar 45 persen adalah lulusan SLTA. Sama halnya dengan sektor industri, listrik dan gas (LGA) ,

konstruksi, transportasi, lembaga keuangan, dan jasa dimana lebih dari 50 persen menyerap pekerja dengan pendidikan minimal SLTA.

Tabel 5.6 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Pendidikan yang Ditamatkan

Lapangan Usaha	Pendidikan yang Ditamatkan					Jumlah
	< SD	SD	SLTP	SLTA	PT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertanian ¹⁾	59.3	18.8	12.0	9.0	0.9	100
Pertambangan ²⁾	6.9	24.0	15.0	44.7	9.4	100
Industri	4.1	13.5	28.9	49.3	4.3	100
LGA ³⁾	0.0	0.0	14.2	56.7	29.2	100
Konstruksi	6.1	13.2	24.4	49.1	7.2	100
Perdagangan ⁴⁾	7.8	22.4	22.1	40.0	7.6	100
Transportasi ⁵⁾	2.3	19.2	18.2	56.4	4.0	100
Lembaga Keuangan ⁶⁾	2.4	2.1	4.2	55.8	35.4	100
Jasa ⁷⁾	1.2	4.3	5.8	41.5	47.3	100
Jumlah	40.4	16.8	13.0	21.2	8.6	100

Sumber: Sakernas, Agustus 2016

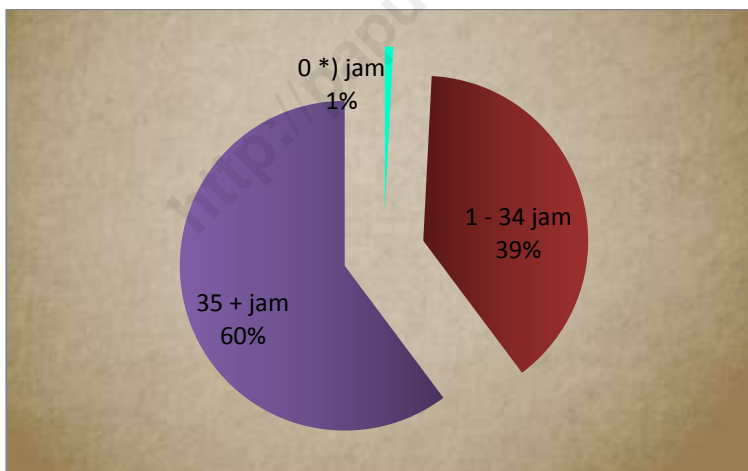
Keterangan:

- 1 : Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan
- 2 : Pertambangan dan Penggalian
- 3 : Listrik, Gas, Uap, dan Air
- 4 : Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
- 5 : Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
- 6 : Lembaga Keuangan, Real Estate, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
- 7 : Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

5.5 Penduduk Bekerja menurut Jam Kerja

Salah satu indikator untuk melihat kinerja pekerja adalah dengan melihat jumlah jam kerja. Hal ini berguna untuk mengetahui proporsi penduduk bekerja yang dapat dikategorikan sebagai pekerja “murni” dan proporsi penduduk bekerja namun dikategorikan pengangguran karena jumlah jam kerjanya kurang dari jumlah jam kerja normal. Di Indonesia seseorang dikatakan murni bekerja apabila bekerja minimal 35 jam selama seminggu dengan konsep jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja tidak termasuk jam istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal di luar pekerjaan. Jumlah jam kerja tersebut merupakan kumulatif selama satu minggu.

Gambar 5.5 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Jam Kerja



Sumber: Sakernas, Agustus 2016

Secara keseluruhan persentase pekerja terbesar bekerja di atas 35 jam yaitu 60 persen. Sementara itu pekerja dengan jam kerja antara 1 sampai 34 jam ada sebanyak 39 persen atau dapat dikategorikan sebagai setengah

penganggur. Sedangkan pekerja yang sementara tidak bekerja mempunyai persentase sekitar 1 persen.

Tabel 5.7 berikut menyajikan gambaran mengenai jumlah pekerja menurut jumlah jam kerja dan lapangan usaha. Pada umumnya sebagian besar pekerja memiliki jam kerja normal (di atas 35 jam). Khusus pada sektor pertanian, jumlah pekerja yang bekerja di atas 35 jam dengan di bawah jam kerja normal mempunyai jumlah yang tidak terpaut jauh, yaitu masing-masing secara persentase 45 persen dan 54 persen. Sebaliknya, pada sektor-sektor lain minimal 60 persen pekerjanya bekerja pada jam kerja normal.

Tabel 5.7 Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jumlah Jam Kerja

Lapangan Usaha	Jumlah Jam Kerja			Jumlah
	Sementara tidak bekerja (0 jam)	Di bawah jam kerja normal (1-34 jam)	Jam kerja normal (≥ 35 jam)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian	4 183	549 848	541 638	1 095 669
Pertambangan	0	2 771	10 763	13 534
Industri	2 527	6 212	23 819	32 558
LGA	0	439	3 388	3 827
Konstruksi	4 076	1 575	36 885	42 536
Perdagangan	1 294	24 136	134 722	160 152
Transportasi	0	12 688	63 125	75 813
Lembaga Keuangan	0	1 609	15 757	17 366
Jasa	1 480	49 364	172 186	223 030
Jumlah	13 560	648 642	1 002 283	1 664 485
%	0.81	38.97	60.21	100.00

Sumber: Sakernas, Agustus 2016

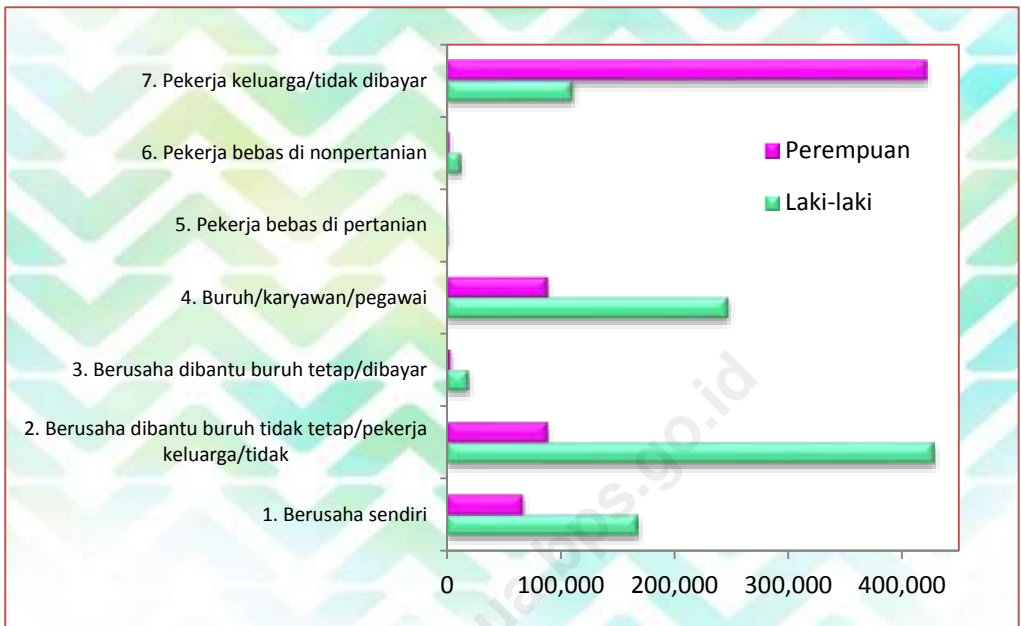
5.6 Penduduk Bekerja menurut Status Pekerjaan

Status pekerjaan merupakan kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha/kegiatan. Salah satu kegunaan dalam menganalisis status pekerjaan pekerja adalah untuk mengetahui pekerja di sektor informal.

Berdasarkan hasil Sakernas tahun 2016, tercatat bahwa status pekerjaan mayoritas pekerja di Papua adalah sebagai pekerja keluarga/ tidak dibayar dan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar yang berturut-turut mempunyai persentase 31,99 persen dan 31,10 persen. Selanjutnya adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 20,22 persen.

Bila ditinjau dari segi jenis kelaminnya, maka perempuan lebih banyak bekerja sebagai pekerja keluarga/tak dibayar. Persentase perempuan yang bekerja sebagai pekerja keluarga/tak dibayar besarnya adalah 79,19 persen, dan sisanya 20,81 adalah laki-laki. Ketimpangan lain terjadi pada status buruh/karyawan/pegawai, di mana lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Laki-laki yang berstatus sebagai buruh/karyawan ada sebanyak 247.470 orang (73,51 persen), sementara perempuan hanya sebanyak 89.160 orang (26,49 persen). Hal ini memberikan kesimpulan bahwa secara umum laki-laki lebih dominan dalam hal pekerjaan. Meskipun pada status pekerja keluarga perempuan lebih mendominasi, namun kenyataannya mereka tidak menerima upah atau penghasilan dari apa yang mereka kerjakan.

Gambar 5.6 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Jenis Kelamin



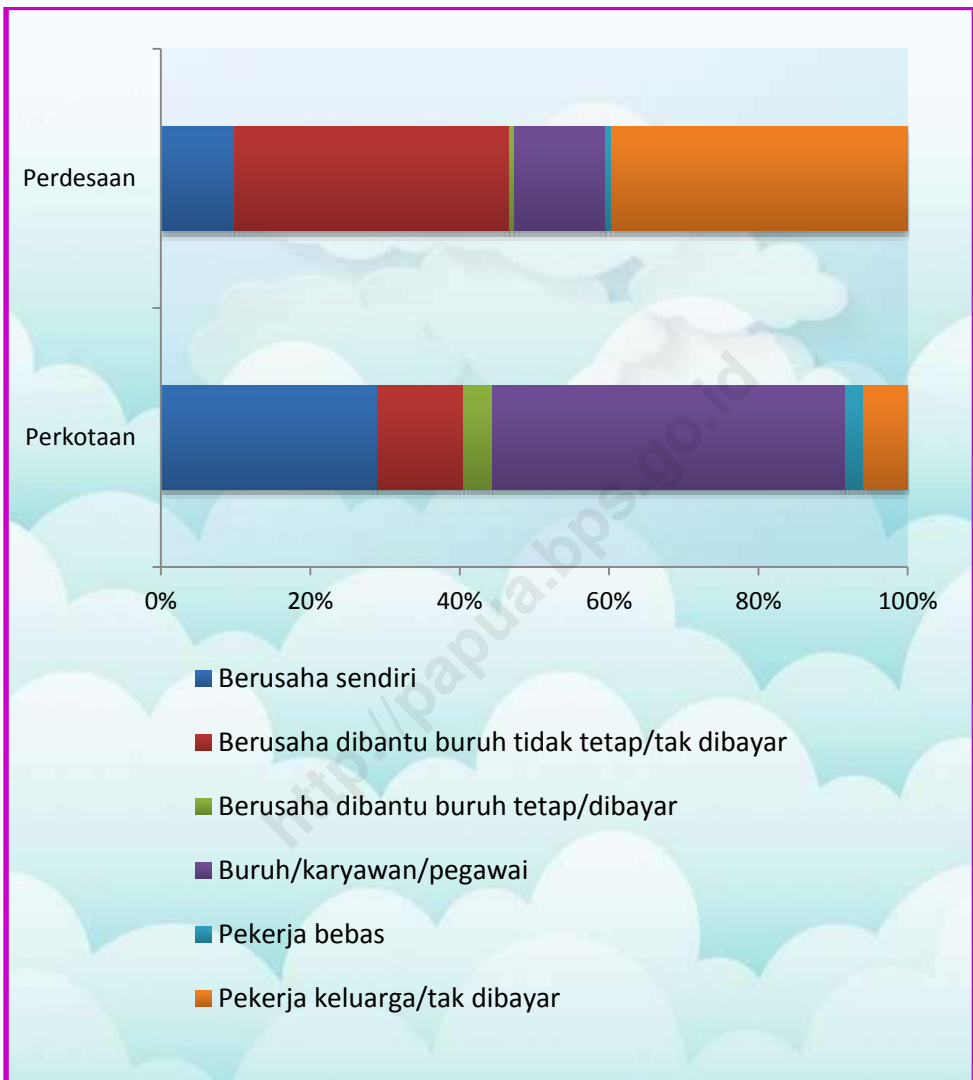
Sumber: Sakernas, Agustus 2016

Gambaran mengenai distribusi pekerja menurut status pekerjaan menurut topografi disajikan pada Gambar 5.7 di bawah. Pada daerah perkotaan terlihat bahwa mayoritas penduduknya bekerja dengan status buruh//karyawan. Lain halnya

Sebagian besar pekerja di perdesaan berstatus sebagai pekerja tak dibayar.

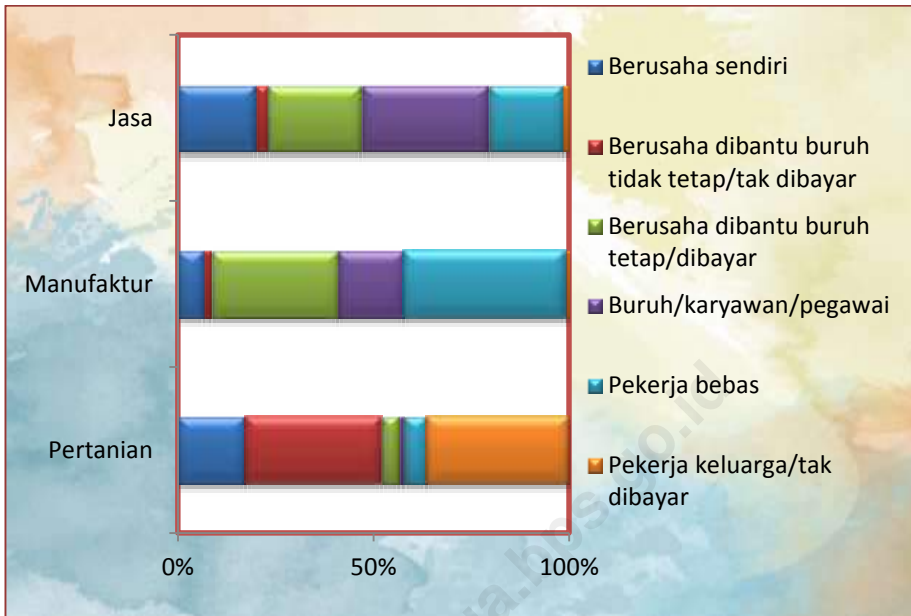
dengan wilayah perdesaan mempunyai kecenderungan bahwa mayoritas pekerjaanya adalah pekerja keluarga dan berusaha dibantu buruh tidak tetap.

Gambar 5.7 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Kota/Desa dan Status Pekerjaan



Sumber: Sakernas, Agustus 2016

Gambar 5.8 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status Pekerjaan dan Lapangan Usaha



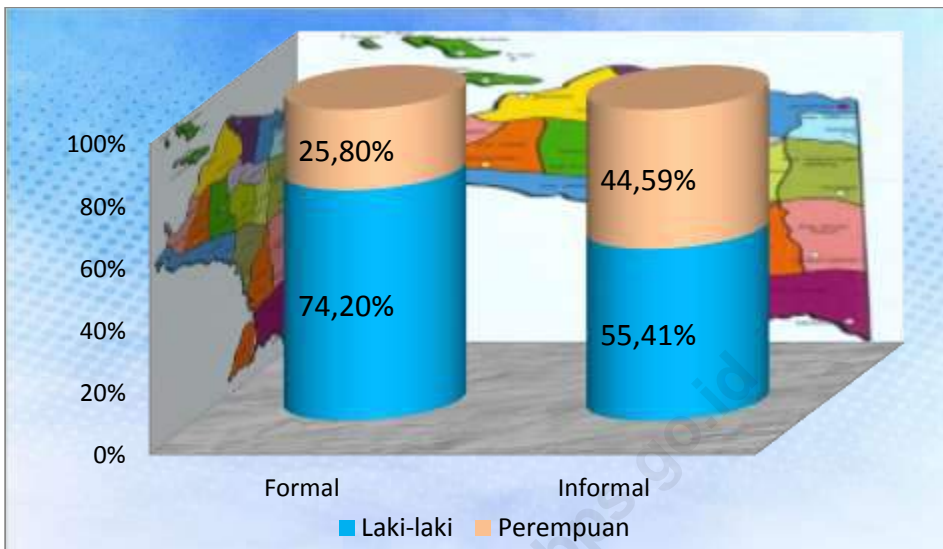
Sumber: Sakernas, Agustus 2016

Jika ditinjau berdasarkan lapangan usahanya, maka jelas terlihat perbedaan status pekerjaan antara pertanian, manufaktur, dan jasa. Sebagian besar pekerja pertanian berstatus sebagai pekerja keluarga dan berusaha dibantu buruh tidak tetap, masing-masing memiliki persentase 46,04 persen dan 42,80 persen. Sementara itu sektor manufaktur lebih didominasi oleh pekerja dengan status sebagai buruh/karyawan di mana persentasenya mencapai 55,81 persen. Demikian halnya dengan sektor jasa sebanyak 57,41 persennya merupakan pekerja dengan status buruh/karyawan.

5.7 Penduduk Bekerja menurut Sektor Fomal Informal

Sesuai dengan definisi yang dijelaskan pada Bab II tentang klasifikasi sektor formal dan informal, hanya sekitar 28,50 persen penduduk bekerja di sektor formal, sisanya 71,50 persen merupakan pekerja sektor informal.

Gambar 5.9 Persentase Penduduk 15 Tahun ke atas yang Bekerja menurut Status dan Jenis Kelamin



Sumber: Sakernas, Agustus 2016

Sementara jika dilihat berdasarkan jenis kelaminnya, jelas terlihat bahwa sektor formal dan informal lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Bila dikaji dari kedua sektor, jumlah pekerja sektor informal pada tahun 2016 mencapai 1.304.411 orang atau 78,37 persen lebih banyak dibandingkan pada sektor formal. Hal ini mengindikasikan banyak penduduk di atas 15 tahun yang lebih memilih bekerja pada sektor informal.

Banyaknya pekerja di sektor informal sangat berkaitan dengan banyaknya penduduk bekerja pada sektor pertanian. Seperti telah dipaparkan sebelumnya bahwa pertanian mendominasi penyerapan tenaga kerja di sebagian besar kabupaten di Provinsi Papua. Banyaknya penduduk bekerja di sektor pertanian, terutama yang berstatus pekerja tidak dibayar menyebabkan tingginya persentase pekerja sektor informal.



<http://papua.bps.go.id>

BAB VI PENGANGGURAN

6.1 Pengangguran menurut Kelompok Umur

Pengangguran secara konsepsi merupakan bagian dari angkatan kerja. Adanya sejumlah pengangguran pada dasarnya menggambarkan adanya kelebihan penawaran tenaga kerja (*excess supply*) pada pasar kerja dibanding lowongan yang tersedia. Pengangguran merupakan keadaan seseorang yang mengalami hambatan di dalam usahanya untuk memperoleh pekerjaan.

Pada tahun 2016, jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Papua adalah sebanyak 57.677 orang atau sebesar 3,35 persen dari total angkatan kerja. Banyak pemerhati ketenagakerjaan berpendapat bahwa nilai ini terlalu kecil. Namun, perlu diingat kembali bahwa seseorang yang bekerja membantu orang tuanya walaupun sebentar asalkan lebih dari 1 jam dalam satu minggu tetap tergolong sebagai bekerja.

*Jumlah
pengangguran di
Papua sebesar
57.677 orang*

Gambar 6.1 berikut menggambarkan jumlah pengangguran yang dirinci menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Secara umum, jumlah pengangguran paling tinggi berada pada kelompok usia 20-24 tahun. Hal ini ditengarai karena

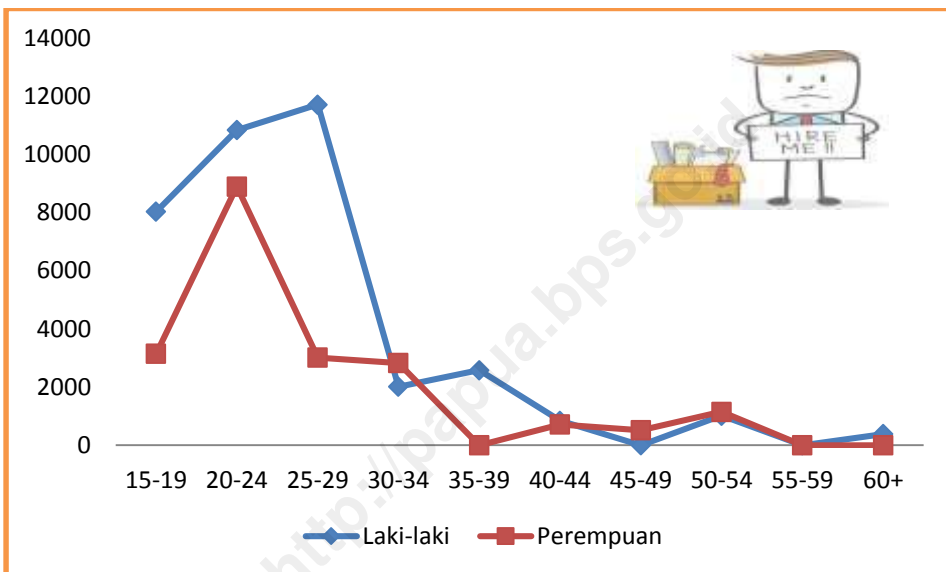
*Pengangguran
terbanyak berada
pada kelompok
usia 20-24 tahun*

banyaknya output dari dunia pendidikan yang belum bersegera untuk bekerja. Pada umur-umur tersebut banyak orang yang setelah lulus sekolah sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha.

Sedangkan jika dibedakan menurut jenis kelamin, pengangguran tertinggi pada kelompok perempuan terjadi pada usia 20-24 tahun (8.897

orang), sedangkan kelompok laki-laki terjadi pada usia 25-29 tahun (11.708 orang). Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan laki-laki bersekolah dalam jenjang yang lebih tinggi dibandingkan perempuan. Menyebabkan besaran output pendidikan antara laki-laki dan perempuan berada pada kelompok umur yang berbeda.

Gambar 6.1 Pengangguran menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin



Sumber: Sakernas, Agustus 2016

6.2 Pengangguran menurut Kota/Desa

Secara keseluruhan, sebagian besar pengangguran di Papua adalah laki-laki yaitu 37.413 orang atau sekitar 64.87 persen. Jika ditinjau menurut kota/desa, pengangguran terbanyak terjadi di daerah perkotaan sebesar 28.999 orang (50,28 persen). Hal ini terjadi karena banyak penduduk dari berbagai kabupaten yang datang untuk mencari pekerjaan di wilayah perkotaan, mengingat lebih banyak peluang dan fasilitas yang disediakan di wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah perdesaan.

Tabel 6.1 Pengangguran menurut Kota/Desa dan Jenis Kelamin

Kota/Desa	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	18 268	10 731	28 999
Perdesaan	19 145	9 533	28 678
Jumlah (Papua)	37 413	20 264	57 677

Sumber: Sakernas, Agustus 2016

6.3 Pengangguran menurut Kejadiannya

Pengangguran menurut kejadiannya terdiri dari mereka yang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, putus asa/ merasa tidak mungkin dapat kerja, dan sudah mempunyai pekerjaan tapi belum mulai bekerja. Tabel 6.2 berikut menyajikan gambaran tentang jumlah pengangguran menurut jenis kelamin dan kejadiannya.

Tabel 6.2 Pengangguran menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin

Jenis Kegiatan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
	Laki-laki	Perempuan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mencari Pekerjaan	26 000	19 246	42 065	72.93
Mempersiapkan Usaha	790	365	1 155	2.00
Putus asa/merasa tidak mungkin mendapat kerja	7 321	3 183	10 504	18.21
Sudah punya tapi belum mulai kerja	3 302	651	3 953	6.85
Jumlah	37 413	20 264	57 677	100

Sumber: Sakernas, Agustus 2016

Bila dilihat menurut kegiatannya, dari seluruh pengangguran di Papua, persentase terbesar adalah yang mencari pekerjaan sekitar 72,93 persen. Mereka yang mencari pekerjaan adalah mereka yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; mereka yang sudah pernah bekerja, karena suatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan; serta mereka yang bekerja atau mempunyai pekerjaan, tetapi karena suatu hal masih berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lain.

Kegiatan yang dilakukan oleh sebagian besar pengangguran di Papua adalah mencari pekerjaan

Persentase terkecil terdapat pada kegiatan mempersiapkan usaha, yaitu sebesar 2 persen. Mempersiapkan usaha cenderung pada pekerjaan yang berusaha sendiri atau berusaha dibantu buruh tidak tetap atau berusaha dibantu buruh tetap. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan penduduk untuk berwiraswasta atau membuka usaha sendiri sangat kecil, dan mereka lebih memilih mencari pekerjaan daripada membuka lapangan usaha. Di samping itu ada sebanyak 6,85 persen pengangguran yang sudah diterima bekerja, namun belum mulai bekerja. Hampir pasti angka ini akan bergeser dari status sebagai pengangguran menjadi bekerja.

6.4 Pengangguran menurut Tingkat Pendidikan



Total Angka **Pengangguran berijazah (SLTA+)**
di Papua mencapai

40.444 orang

(Sakernas, Agustus 2016)

Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam pasar tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui sarana pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang yang termasuk angkatan kerja akan mempengaruhi dan meningkatkan tingkat produktivitas dalam pekerjaannya. Untuk itu analisis pengangguran menurut tingkat pendidikan dapat digunakan sebagai indikator ketidakmampuan pasar tenaga kerja memanfaatkan *supply* angkatan kerja.

Tingkat pengangguran terdidik merupakan indikator dari besarnya jumlah dan persentase pengangguran yang memiliki tingkat pendidikan cukup tinggi di suatu wilayah. Secara absolut, jumlah pengangguran di Papua terdistribusi di semua jenjang pendidikan, seperti disajikan pada

*Separuh lebih
pengangguran di
Provinsi Papua
berpendidikan tinggi*

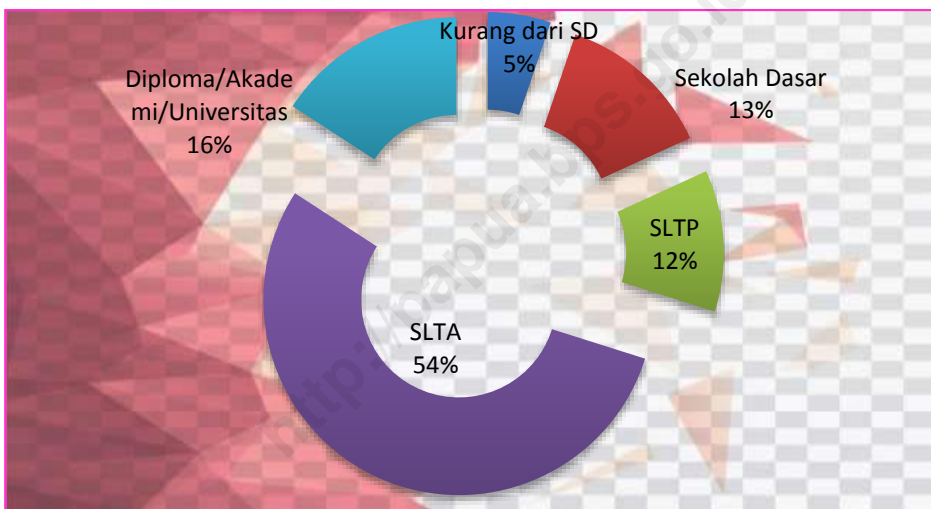
gambar 6.2. Separuh lebih pengangguran di Provinsi Papua berpendidikan SLTA/ sederajat, yaitu sebesar 54,29 persen. Selanjutnya adalah diploma/universitas sebesar 15,83 persen.

Tingginya pengangguran pada pendidikan tinggi lebih disebabkan karena mereka lebih bersifat selektif dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan dan atau keterampilan yang mereka miliki. Seringkali terjadi bahwa lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sementara itu, mereka memiliki kecenderungan untuk lebih memilih mencari pekerjaan di sektor formal daripada informal, sehingga

menyebabkan angka pengangguran yang berpendidikan menengah/tinggi lebih tinggi dibanding yang berpendidikan rendah.

Dari sisi permintaan pasar tenaga kerja, tenaga kerja dengan pendidikan yang lebih tinggi akan berdampak pada pemberian upah kerja yang lebih tinggi pula. Dengan demikian, permintaan tenaga kerja cenderung lebih besar untuk pekerja dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, terutama lulusan SLTP, SD dan dibawah SD.

Gambar 6.2 Pengangguran menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan



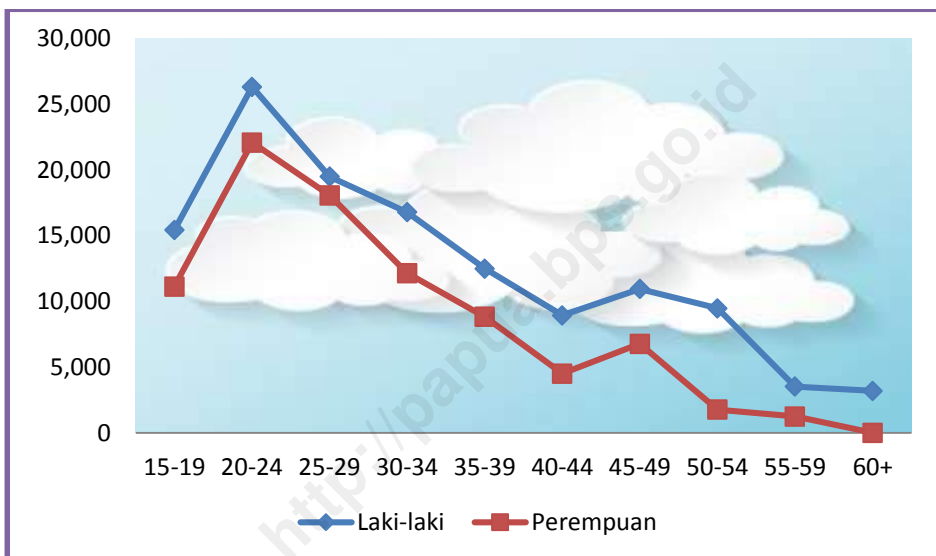
Sumber: Sakernas, Agustus 2016

6.5 Setengah Pengangguran

Penduduk yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dikategorikan dalam kelompok setengah pengangguran. Jumlah setengah pengangguran di Provinsi Papua Tahun 2016 adalah sebanyak 648.642 orang, yang terdiri dari 213.247 orang setengah penganggur terpaksa dan 435.395 orang setengah penganggur sukarela.

Dalam kenyataannya setengah pengangguran sukarela tidak terlalu diperhitungkan dalam kategori pengangguran. Hal ini karena setengah penganggur sukarela memang tidak sedang mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain, meskipun jam kerjanya kurang dari jam kerja normal.

Gambar 6.3 Setengah Penganggur Terpaksa menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

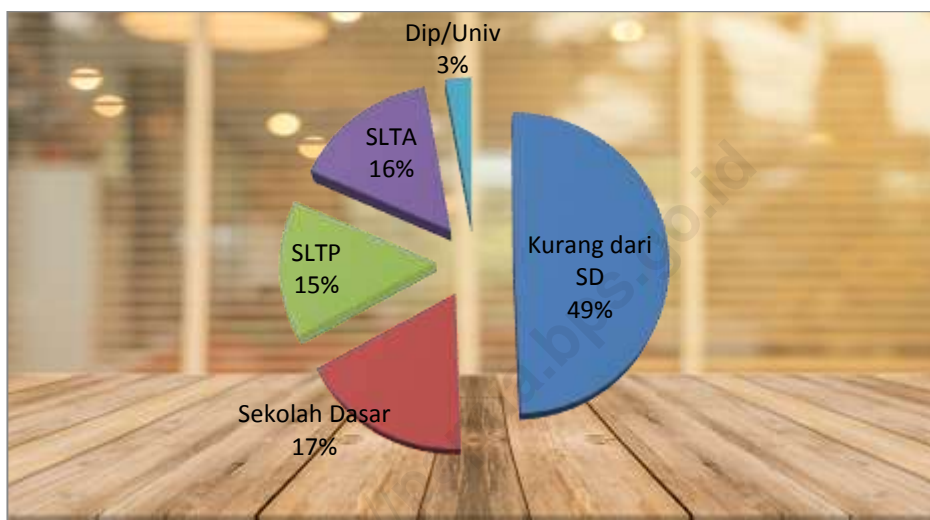


Sumber: Sakernas, Agustus 2016

Setengah penganggur terpaksa paling banyak berada pada kelompok umur 20-24 tahun (48.437 orang). Pada kelompok usia ini, kecenderungan mencari pekerjaan atau menerima tawaran pekerjaan lain masih tinggi. Artinya mereka yang masih bekerja di bawah jam kerja normal masih punya keinginan untuk menambah pekerjaan lain (paruh waktu) atau mencari pekerjaan lain yang lebih sesuai. Dengan semakin meningkatnya umur, maka jumlah setengah penganggur pun semakin menurun.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, secara umum jumlah penganggur terpaksa lebih banyak laki-laki dibanding perempuan. Hal ini terjadi di semua kategori kelompok umur, dan secara perlahan keduanya menurun menjelang usia 50 tahun.

Gambar 6.4 Setengah Penganggur Terpaksa menurut Pendidikan yang Ditamatkan



Sumber: Sakernas, Agustus 2016

Berbeda dengan pengangguran terbuka, sebagian besar setengah penganggur terpaksa berpendidikan SD ke bawah, yaitu sekitar 49,44 persen. Penduduk yang berpendidikan rendah cenderung bekerja seadanya, dan masih mencari pekerjaan yang lebih baik karena tuntutan ekonomi.

BAB VII

INDIKATOR KETENAGAKERJAAN

7.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK adalah ukuran proporsi penduduk usia kerja yang terlibat secara aktif di pasar kerja, baik dengan bekerja, mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha. Ukuran ini merupakan indikasi relatif dari pasokan tenaga kerja tersedia yang terlibat dalam produksi barang dan jasa.

Secara keseluruhan, TPAK Provinsi Papua pada tahun 2016 adalah sebesar 76,70 persen. Umumnya TPAK laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. Pada level provinsi, TPAK laki-laki adalah 85,85 persen, sementara perempuan 66,25 persen.

Pada tahun 2016, TPAK Provinsi Papua adalah 76,70 persen

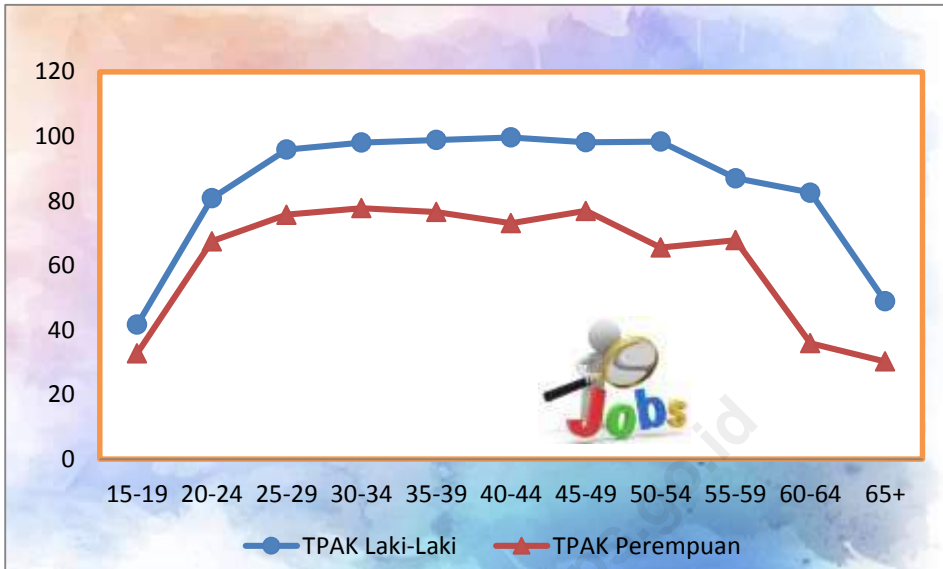
Begitu juga TPAK pada daerah kota dan desa, di mana partisipasi laki-laki lebih tinggi daripada perempuan.

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, maka tingkat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi selalu lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini terjadi pada setiap kelompok umur. Partisipasi laki-laki paling tinggi adalah pada usia 40-44 tahun (99,68 persen). Hal ini berarti usia puncak pada laki-laki untuk berpartisipasi dalam kegiatan

Partisipasi perempuan untuk aktif secara ekonomi pada setiap kelompok umur selalu lebih rendah daripada laki-laki

ekonomi adalah antara umur 40-44 tahun, sedangkan untuk perempuan antara umur 30-34 tahun (77,76 persen).

Gambar 7.1 TPAK menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

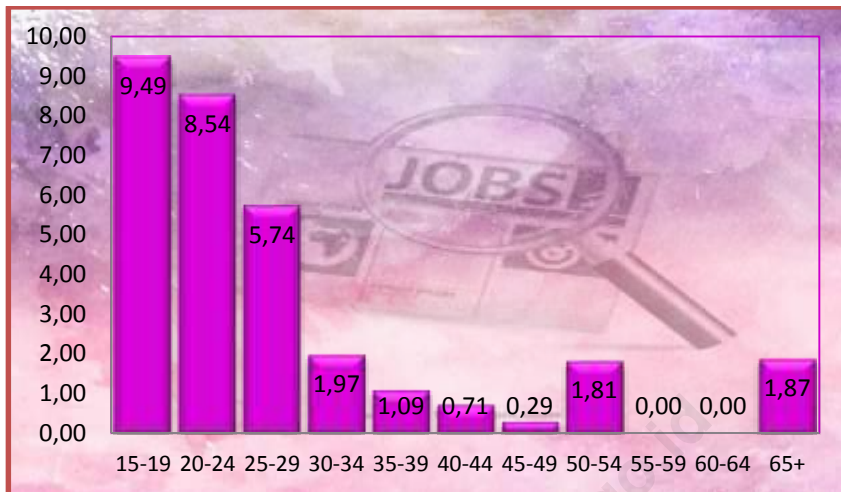


Sumber: Sakernas, Agustus 2016

7.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator penting berikutnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yaitu persentase pengangguran terhadap angkatan kerja. TPT Provinsi Papua pada tahun 2016 adalah sebesar 3,35 persen terhadap total angkatan kerja. Jika ditinjau berdasarkan kelompok umur, kelompok umur dengan nilai TPT tertinggi berada pada rentang usia 15-19 tahun dengan nilai TPT 9,49. Hal ini disebabkan penduduk angkatan kerja yang berada pada kelompok umur tersebut belum terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi dan cenderung memilih bersekolah ataupun mengurus rumah tangga sehingga nilai TPT relatif tinggi. Sedangkan kelompok umur 55 tahun ke atas memiliki TPT 1,87 persen. Artinya pengangguran di kelompok usia tersebut sangat rendah.

Tabel 7.2 Tingkat Pangangguran Terbuka (TPT) menurut Kelompok Umur



Sumber: Sakernas, Agustus 2016

Semakin kecil persentase TPT menunjukkan semakin besarnya tenaga kerja yang terserap dalam lapangan usaha/sector, juga mencerminkan kestabilan suatu daerah di bidang ketenagakerjaan. Apabila terlalu banyak tenaga kerja yang tidak tertampung di lapangan usaha, atau lapangan usaha sangat terbatas untuk menyerap tenaga kerja yang terindikasi melalui TPT yang tinggi, maka masalah sosial (kejahatan, demonstrasi dan lainnya) akan sangat rawan.

7.3 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)

Selain TPAK dan TPT, masih ada satu indikator ketenagakerjaan yaitu Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), merupakan persentase tenaga kerja yang terserap pada seluruh sektor-sektor yang ada terhadap angkatan kerja. Dengan kata lain, TKK merupakan selisih TPT terhadap 100 persen.

TKK Provinsi Papua Tahun 2016 sebesar 96,65 yang berarti 96,65 persen penduduk usia kerja terserap dalam aktivitas ekonomi

Semakin tinggi TKK, semakin banyak tenaga kerja yang terserap, akhirnya semakin stabil keadaan suatu daerah dalam hal ketenagakerjaan. Nilai TKK Provinsi Papua Tahun 2016 sebesar 96,65 persen. Dari Tabel 7.3 dapat dilihat nilai TKK berdasarkan kelompok umur di Provinsi Papua. Nilai TKK pada gambar tersebut cenderung naik dari kelompok umur 15 tahun hingga 49 tahun. Nilai TKK tertinggi berada pada rentang usia 45-49 tahun, yaitu sebesar 99,71 persen.

Tingginya TKK di Papua disebabkan sebagian besar tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian atau tingkat pendidikan yang cukup tidak langsung menganggur, karena mereka diserap oleh sektor pertanian yang masih tradisional.

Gambar 7.3 Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) menurut Kelompok Umur



Sumber: Sakernas, Agustus 2016

7.4 Perkembangan Indikator Tenaga Kerja

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, penduduk usia kerja juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 jumlah penduduk usia kerja adalah sebanyak 1.375.169 orang, dan meningkat menjadi 2.245.462 orang pada tahun 2016. Selama kurun waktu 2011 hingga 2016, peningkatan penduduk usia kerja selalu berbanding lurus dengan peningkatan jumlah angkatan kerja.

Menurunnya angka pengangguran yang disertai dengan meningkatnya TPAK adalah pencapaian ideal yang diharapkan. Pada tahun 2011 TPT mencapai sekitar 8 persen, dan menurun sepanjang tahun 2011-2016 menjadi 3,35. Kondisi ini diiringi juga dengan peningkatan TPAK dari 68,8 persen di tahun 2011 menjadi 76,70 persen di tahun 2016. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi perubahan kondisi ketenagakerjaan pada tahun 2016 dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 7.1 Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Provinsi Papua Tahun 2011-2016

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angkatan Kerja	1 375 169	1 557 089	1 610 484	1 675 113	1 741 945	1 722 162
Bukan Angkatan Kerja	622 204	432 314	462 222	454 291	447 285	523 300
Usia Kerja	1 997 373	1 989 403	2 072 706	2 129 404	2 189 230	2 245 462
TPAK	68,8	78,27	77,7	78,7	79,57	76,70
TPT	8,8	3,65	3,15	3,4	3,99	3,35
TKK	91,2	96,4	96,8	96,6	96,01	96,65

Sumber: Sakernas, Agustus 2011-2016

7.5 Penduduk Bukan Angkatan Kerja

Tabel 7.2 Penduduk Bukan Angkatan Kerja menurut Kelompok Umur dan Jenis Kegiatan

Kabupaten/Kota	Jenis Kegiatan			Jumlah
	Sekolah	Mengurus RT	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15-19	161 584	1 8332	15 744	195 660
20-24	30 645	38 822	9 534	79 001
25-29	2 332	35 530	3 373	41 235
30-34	0	30 611	2 248	32 859
35-39	358	31 376	358	32 092
40-44	716	31 420	420	32 556
45-49	0	20 785	1 988	22 773
50-54	0	20 348	1 624	21 972
55-59	0	12 474	5 714	18 188
60-64	0	13 703	3 707	17 410
65+	0	15 184	14 370	29 554
Jumlah (Papua)	195 635	268 585	59 080	447 285

Sumber: Sakernas, Agustus 2016

Bahasan ini sengaja ditampilkan satu bab bersama indikator ketenagakerjaan, sehingga dapat diketahui penyebaran penduduk bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang tidak bekerja maupun sementara tidak bekerja. Dengan kata lain yang dikerjakan oleh penduduk bukan angkatan kerja adalah sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya. Secara keseluruhan, sebagian besar penduduk bukan angkatan kerja di Papua adalah mengurus rumah tangga yaitu sebesar 51,49 persen. Selanjutnya penduduk yang bersekolah sebesar 39,11 persen dan yang melakukan kegiatan lainnya ada sebesar 9,4 persen.

Halaman ini sengaja dikosongkan



<http://papua.bps.go.id>

BAB VIII

KESIMPULAN

Tujuan disusunnya publikasi ini adalah untuk memberikan gambaran ketenagakerjaan di Provinsi Papua pada tahun 2016. Berikut beberapa kesimpulan yang diperoleh dari publikasi ini:

i. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja di Papua pada tahun 2016 mencapai 2.245.462 orang, di mana persentase penduduk usia kerja laki-laki lebih banyak daripada perempuan dan jumlah terbesar penduduk usia kerja terdapat pada kelompok usia muda yaitu 15-44 tahun yang mencapai 76,56 persen. Kegiatan utama yang paling banyak dilakukan penduduk usia kerja selama seminggu yang lalu adalah bekerja dengan persentase sebesar 74 persen.

ii. Penduduk Angkatan Kerja

Jumlah penduduk angkatan kerja di Papua pada tahun 2016 adalah 1.722.162 orang. Angkatan kerja paling banyak berada pada kelompok umur 25-29 tahun yang mencapai 14,9 persen. Tingkat pendidikan angkatan kerja di Papua masih tergolong rendah, di mana jumlahnya lebih dari separuh dari total angkatan kerja SD Ke bawah, bahkan 39 persennya berpendidikan tidak tamat SD.

iii. Penduduk Bekerja

Penduduk bekerja di Papua pada tahun 2015 ada sebanyak 1.664.485 orang atau setara dengan 96,65 persen dari total penduduk usia kerja. Jumlah terbanyak pekerja berada pada usia 25-29 tahun yang besarnya mencapai 241.683 orang atau sekitar 14,52 persen dari seluruh pekerja. Sementara itu, lebih dari 40 persen pekerja berpendidikan SD ke bawah.

Sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Papua.

iv. Pengangguran

Jumlah pengangguran di Provinsi Papua pada tahun 2016 sebanyak 57.677 orang atau sekitar 3,35 persen dari total angkatan kerja, di mana 64,87 persen adalah laki-laki dan sisanya 35,13 persen perempuan. Persentase pengangguran terbanyak berada pada kelompok usia 20-24 tahun. Sementara itu, lebih dari separuh penganggur adalah berpendidikan tinggi (SLTA ke atas). Menurut kegiatannya, pengangguran karena mencari pekerjaan mempunyai persentase paling besar yaitu sekitar 72,93 persen.

v. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Secara umum TPAK di Provinsi Papua tergolong tinggi, yaitu sebesar 76,70 persen. Tingkat partisipasi laki-laki paling tinggi pada usia 40-44 tahun. Sedangkan tingkat partisipasi perempuan paling tinggi antara 30-34 tahun.

vi. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada tahun 2016, TPT Provinsi Papua adalah sebesar 3,35 persen. Nilai TPT tertinggi berada pada rentang usia 15-19 dan terendah berada pada kelompok umur 55 tahun keatas.

vii. Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Dibanding tahun 2016, kondisi ketenagakerjaan di Papua memperlihatkan adanya penurunan baik dari aspek kuantitas maupun produktivitas. Hal ini juga ditunjukkan dengan berkurangnya partisipasi angkatan kerja dari 79,59 persen menjadi 76,70 persen, namun di sisi lain pada periode waktu yang sama TPT berkurang dari 3,99 persen menjadi 3,55 persen.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

— *Enlighten The Nation* —

<http://papua.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI PAPUA**

Statistics of Papua Province

Jl. DR. Samratulangi Dok II Jayapura 99112

Telp. (0967) 533028, 534519 Fax. (0967) 536490

E-mail: bps9400@bps.go.id Homepage: <http://papua.bps.go.id>